

BUKU PANDUAN

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data

Mempertajam Intervensi Kebijakan

Perencanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Data
Mempertajam Intervensi Kebijakan

Rapat Kerja Teknis

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2015

PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA
Mempertajam Intervensi Kebijakan

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
©2015 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Foto Sampul: Sekretariat TNP2K

Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai Buku Panduan ini, silahkan hubungi TNP2K-Unit Advokasi Daerah (advokasi@tnp2k.go.id)

Buku Panduan ini juga tersedia di Website TNP2K (www.tnp2k.go.id)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511
Email: info@tnp2k.go.id
Website: www.tnp2k.go.id

Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR KOTAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii-viii
PENGANTAR	1-2
TENTANG BUKU PANDUAN INI	3-4
PENDAHULUAN	5-7
Prinsip Strategi Penanggulangan Kemiskinan	6
Perencanaan Berbasis Data	6-7
Peran Kunci TKPK	7
KARAKTERISTIK DATA, SUSENAS, PODES, DAN BDT	9-15
Data Susenas	10
Metodologi Pengumpulan Data	10-11
Tujuan dan Manfaat	11
Variabel	11
Data Potensi Desa (Podes)	12
Metodologi Pengumpulan Data	12
Tujuan Dan Manfaat	13
Variabel	13
Basis Data Terpadu (BDT)	13-15
Metodologi Pengumpulan Data	14
Tujuan Dan Manfaat	14-15
Variabel	15
KERANGKA ANALISIS SITUASI KEMISKINAN	17-27
Mengidentifikasi Prioritas Masalah	18-20
Mengidentifikasi Determinan Masalah: Prioritas Intervensi	20-26
Mengidentifikasi Prioritas Wilayah	26-27
Mengidentifikasi Prioritas Rumah-Tangga Sasaran	27
CONTOH KASUS	29-44
Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh	30-35
Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	35-38



Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Prasarana Dasar Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur	38-39
Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanagara, Provinsi Kalimantan Timur	40-44
PENUTUP	45-52
Lampiran A: Teknis Penggunaan Aplikasi Berbasis Stat-Planet	47-52
Langkah-langkah Mengoperasikan Aplikasi	48-50
Cara Menggunakan Fungsi Panel Grafik	51
Fasilitas-fasilitas Lain yang Tersedia	52
Penjelasan dan Bimbingan Teknis Lebih Lanjut	52
Lampiran B: Teknis Penggunaan Aplikasi Berbasis Excel	53-62
Menggunakan Aplikasi	54-55
Menu Analisis	55-59
Analisis Posisi Relatif	55-56
Analisis Perkembangan Antar Waktu	56
Analisis Efektivitas	57
Analisis Relevansi	57
Analisis Keterkaitan	58
Analisis Prioritas Intervensi Wilayah	58-59
<i>Entry dan Update Data</i>	59-62
Data Level Kabupaten	59
Data Level Kecamatan	60-61
Data Indikator	61
Data Pengguna	62
Lampiran C: Variabel Data Susenas, Podes dan BDT	63-80

Daftar Gambar

Gambar 4-1	Identifikasi Masalah Terkait Angka Morbiditas di Kabupaten Nagan Raya	30
Gambar 4-2	Keterkaitan masalah angka morbiditas dengan sebagian Indikator pendukungnya di Kabupaten Nagan Raya	32
Gambar 4-3	Ketersediaan fasilitas BAB di Kecamatan Seunagan Timur dan TPAT di Kecamatan Beutong	33
Gambar 4-4	Ketersediaan fasilitas BAB dan tempat pembuangan akhir tinja di Desa Blang Baro di Seunagan Timur dan Desa Babah Krueng di Beutong, Kabupaten Nagan Raya	33
Gambar 4-5	Jumlah Individu Peserta Program Jamkesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013	34
Gambar 4-6	Ketersediaan Sarana/Prasarana Kesehatan di Kabupaten Nagan Raya	35
Gambar 4-7	Identifikasi Masalah Terkait APM SMP/MTs di Kabupaten Sumba Timur	36
Gambar 4-8	Keterkaitan masalah APM SMP/MTs dengan sebagian Indikator Pendukungnya di Kabupaten Sumba Timur	36
Gambar 4-9	Jarak SMP/MTs menurut desa di Kabupaten Sumba Timur	37
Gambar 4-10	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah menurut kecamatan di Kabupaten Sumba Timur	37
Gambar 4-11	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah menurut desa di Kecamatan Umalulu	38
Gambar 4-12	Identifikasi Masalah Terkait Akses pada Sanitasi Layak di Kabupaten Bondowoso	39
Gambar 4-13	Kondisi terkait determinan sanitasi layak di tingkat desa di Kabupaten Bondowoso	39
Gambar 4-14	Identifikasi Karakteristik Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara	40
Gambar 4-15	Keterkaitan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Sebagian Indikator Pendukungnya di Kabupaten Kutai Kartanegara	41
Gambar 4-16	Peta Sebaran Lapangan Usaha Individu (Usia 18-60 Tahun) menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, 2011	42
Gambar 4-17	Peta Sebaran Penduduk Usia 15 – di bawah 60 Tahun yang Tidak Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, 2011	43
Gambar 4-18	Distribusi antar-kecamatan determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara	43
Gambar 4-19	Grafik Analisis Prioritas Wilayah Intervensi untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran melalui Intervensi Pada Sektor Pertanian	44



Daftar Tabel

Tabel 3-1	Indikator Utama Kemiskinan Menurut Bidang	19-20
Tabel 3-2	Determinan Masalah Kesehatan Terkait Indikator Angka Morbiditas	21
Tabel 3-3	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar)	22-23
Tabel 3-4	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan	24
Tabel 4-1	Distribusi Individu Sasaran Jamkesmas Antar-Desa di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya	34

Daftar Kotak

Kotak 3.1	<i>Causal tracing strategies</i> untuk menentukan prioritas intervensi	24-26
-----------	--	-------

Daftar Singkatan

AKABA	Angka Kematian Balita
APM	Angka Partisipasi Murni
ASI	Air Susu Ibu
BDT	Basis Data Terpadu
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BSM	Bantuan Siswa Miskin
DDA	Daerah Dalam Angka
IDT	Inpres Desa Tertinggal
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	Jaminan Persalinan
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KB	Keluarga Berencana
KDA	Kecamatan Dalam Angka
KLB	Kondisi Luar Biasa
Kominfo	Komunikasi dan Informasi
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i>
Nakes	Tenaga Kesehatan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
PKH	Program Keluarga Harapan
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PODES	Potensi Desa
Pokja	Kelompok Kerja
Polindes	Pondok Bersalin Desa
PPA-PKH	Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PPS	<i>Probability Proportional to Size</i>
PSE	Pedataan Sosial Ekonomi
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
Raskin	Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran



SD/MI	Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP/MTs	Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah
SPKD	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SPM	Standar Pelayanan Minimum
SP 2010	Sensus Penduduk 2010
SPAL	Saluran Pembuangan Air Limbah
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAT	Tempat Pembuangan Akhir Tinja
UAS	Ujian Akhir Semester
UCI	<i>Universal Child Immunization</i>
UKK	Ulangan Kenaikan Kelas
US/UN	Ujian Sekolah/Ujian Nasional



Pengantar

Karakteristik dan perkembangan kemiskinan di Indonesia dewasa ini mengharuskan adanya kebijakan yang lebih sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam penanganannya. Khususnya melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan itu juga harus dapat diarahkan kepada pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan, selain pemenuhan hak-hak dasar mereka. Sinergi antara penguatan kelembagaan koordinasi dan penajaman substansi kebijakan tersebut merupakan kunci bagi peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Di tingkat daerah penajaman intervensi penanggulangan kemiskinan dapat diupayakan melalui proses perencanaan kebijakan yang lebih berdasarkan bukti dan pengalaman (*evidence-based*). Khususnya dengan memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi untuk mengembangkan analisis situasi kemiskinan. Agar ini terpenuhi TKPK di setiap daerah harus memiliki basis data dan informasi yang berkualitas, tenaga perencana yang terampil dalam menganalisisnya, serta dukungan politik untuk menerapkan proses perencanaan berbasis data dan informasi tersebut dalam penentuan kebijakan.

Berkaitan dengan kebutuhan di atas, buku ini dapat menjadi panduan bagi TKPK untuk mengoordinasikan proses perencanaan penanggulangan kemiskinan yang berbasis data, sehingga menghasilkan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih relevan terhadap permasalahan yang ada di daerah.

Kepada tim penyusun panduan ini, secara khusus kami menyampaikan penghargaan dan harapan agar ke depan dapat terus menyumbangkan inovasi bagi peningkatan kualitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di tanah air.

Jakarta, November 2015

Bambang Widianto

Deputi Seswapres Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan,
Selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K



Tentang Buku Ini

Buku ini adalah panduan untuk memanfaatkan data dalam menganalisis situasi kemiskinan di daerah. Meskipun isinya relevan untuk diterapkan dalam semua konteks perencanaan pembangunan, panduan ini secara khusus diperuntukkan bagi Tim Teknis TKPK untuk mempermudah operasionalisasi fungsi TKPK dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Panduan ini terdiri atas empat bagian. **Bagian 1 (Pendahuluan)** berisi pengantar yang menggarisbawahi prinsip-prinsip strategi penanggulangan kemiskinan sebagai acuan koordinasi perencanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan, baik program nasional maupun daerah. Bagian ini juga menjelaskan arti penting perencanaan yang berbasis data bagi peningkatan kualitas kebijakan pembangunan di daerah, serta peran TKPK dalam membentuk kondisi agar proses tersebut dapat terlaksana di daerah.

Bagian 2 (Karakteristik Data Susenas, Podes, dan BDT) menjelaskan tentang metodologi, tujuan dan manfaat serta variabel yang tercakup dalam masing-masing data Susenas, Podes, dan BDT, sebagai tiga sumber data yang digunakan sebagai bahan utama analisis dalam panduan ini.

Bagian 3 (Kerangka Analisis Situasi Kemiskinan) menguraikan tahapan analisis untuk penentuan prioritas masalah kemiskinan, determinan dan prioritas intervensinya, prioritas wilayah untuk intervensi tersebut, serta prioritas sasaran program di tingkat rumah tangga.

Bagian 4 (Contoh Kasus Analisis) menampilkan contoh penerapan kerangka analisis di atas di dalam kasus perencanaan di beberapa daerah dalam beberapa dimensi kemiskinan. Ilustrasi yang ditunjukkan pada bagian ini akan menggambarkan jenis dan cakupan informasi yang bisa ditampilkan oleh aplikasi analisis yang dikembangkan sebagai komplemen buku ini. Cara penggunaan masing-masing aplikasi yang berbasis *stat planet* dan *excel* dijelaskan dalam Lampiran A dan B.

Bagian 5 (Penutup) merangkum harapan kepada TKPK untuk menindaklanjuti pemahaman yang diperoleh dari penggunaan panduan dan aplikasi ini ke dalam pelaksanaan tugas koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.



Pendahuluan

Prinsip Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi paket kebutuhan dasar, yang terdiri atas makanan dan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sebagainya). Pengertian ini berimplikasi pada strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Strategi pokok tersebut dapat dijalankan melalui perlindungan sosial (*social protection*) dan pencaharian berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Kedua instrumen utama ini akan membantu mengeluarkan kelompok masyarakat miskin dari kemiskinan, sekaligus menjauhkan kelompok masyarakat rentan dari ancaman kemiskinan.

Perlindungan sosial merupakan sistem untuk mengamankan kelompok masyarakat miskin dan rentan dari dampak guncangan perekonomian dan perubahan kebijakan, di samping untuk mengangkat status kesejahteraan mereka. Sedangkan, pencaharian berkelanjutan adalah sistem untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan kerja bagi kelompok penduduk tersebut.

Efektivitas kedua sistem di atas bergantung pada relevansi disain program kebijakan terhadap permasalahan yang ada; dan ketepatan sasaran penerima program yang dimaksud, baik di tingkat rumah-tangga/individu, kelompok warga (komunitas) maupun wilayah. Oleh sebab itu program kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga fokus dan pendekatannya sesuai dengan akar masalah yang ditemukan. Makin kompleks akar masalah itu, makin luas cakupan intervensi yang diperlukan.

Dalam hal penargetan, rumah-tangga dengan ciri kemiskinan yang kronis, atau yang miskin karena akumulasi berbagai faktor, semestinya mendapatkan intervensi program yang lebih komprehensif dibandingkan rumah-tangga dengan faktor risiko miskin yang lebih sederhana. Saat ini penduduk dengan status sosial ekonomi delapan persen terendah—berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT)—menjadi penerima keseluruhan program perlindungan sosial yang mencakup PKH, Raskin, BSM dan JKN.

Perencanaan Berbasis Data

Efektivitas kebijakan ditentukan oleh sejauhmana basis informasi perencanaannya mengacu kepada bukti atau pengalaman (*evidence-based*). Artinya, rancangan kebijakan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan masalah yang ada dan tidak hanya dibuat untuk memenuhi kepentingan jangka-pendek. Kebijakan harus berorientasi pada penanganan akar dari suatu masalah, bukan gejalanya.

Data dan informasi di dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah bahan untuk mengembangkan 'analisis situasi' berdasarkan tujuan (*goals*) pembangunan daerah atau visi dan misi kepala daerah. Analisis situasi adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui masalah, kecenderungannya, serta faktor-faktor yg mempengaruhinya. Dari setiap masalah yang diketahui sebagai prioritas kemudian akan ditentukan sasaran (*objectives*), strategi, dan aksi kebijakan untuk penanganannya.

Situasi kemiskinan daerah dapat dianalisis dengan mengacu kepada 'indikator-indikator utama' yang mengukur hasil (*outcomes/impact*) pembangunan, terutama yang telah ditetapkan

sebagai komitmen global (MDGs), nasional (RPJMN) dan lokal (RPJMD). Indikator-indikator tersebut mewakili berbagai dimensi seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, prasarana dasar, ketahanan pangan dan ketenagakerjaan. Contoh indikator-indikator ini ditunjukkan pada Bagian 3 Buku ini.

Indikator-indikator hasil tersebut juga merupakan acuan bagi pemantauan dan evaluasi kebijakan, program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan (*result-based monitoring and evaluation*), khususnya untuk memperoleh informasi umpan-balik tentang apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan, program atau kegiatan tersebut agar hasil pembangunan yang ditunjukkan oleh suatu indikator bisa lebih diperbaiki.

Peran Kunci TKPK

Dalam mendukung peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran kunci untuk memastikan prioritas intervensi dan wilayah serta rumah-tangga/individu sasaran terakomodasi dalam rencana kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

TKPK dapat mengawali peran ini dengan memfasilitasi perumusan suatu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), yang pada intinya melibatkan proses perencanaan berbasis data. Strategi ini kemudian harus dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga setidaknya dapat dijadikan rujukan formal bagi perencanaan lintas-sektoral pada tahap selanjutnya.

Tanggung-jawab penyediaan data untuk proses perencanaan tersebut terutama berada di bawah koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Sistem Informasi. Pokja ini melibatkan Bappeda, BPS dan Perguruan Tinggi setempat, selain dinas-dinas terkait seperti Dinas Kependudukan serta Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Secara khusus, keterlibatan BPS di dalam TKPK diharapkan bisa menyempurnakan kualitas data dasar yang selama ini disajikan melalui Daerah Dalam Angka (DDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) sehingga lebih bermanfaat bagi proses perencanaan.

Selain menyediakan data melalui suatu sistem informasi kemiskinan, Pokja Pendataan dan Sistem Informasi juga berfungsi untuk mengelola sistem informasi itu sedemikian rupa agar menjadi suatu sistem peringatan dini situasi kemiskinan, khususnya bagi pengambil kebijakan pembangunan daerah. Artinya, masing-masing unsur Kelompok Program di dalam TKPK juga memiliki tugas penting untuk memutakhirkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Melalui forum reguler Rapat Koordinasi TKPK, pimpinan TKPK di setiap daerah dapat memanfaatkan informasi hasil analisis situasi kemiskinan tersebut untuk secara langsung menekankan agenda-agenda prioritas penanggulangan kemiskinan kepada semua sektor dan pemangku kepentingan terkait.





Karakteristik Data, Susenas, Podes, dan BDT

Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Data merupakan keterangan obyektif tentang suatu fakta yang dinyatakan secara kuantitatif, kualitatif maupun dalam bentuk gambar. Pengolahan atas data ini dapat menghasilkan informasi untuk menginterpretasi fakta yang bersangkutan.

Untuk perencanaan penanggulangan kemiskinan, sebagian besar jenis data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Podes (Potensi Desa) dan BDT (Basis Data Terpadu).

Data Susenas

Susenas merupakan kegiatan survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengumpulkan data sosial ekonomi penduduk berupa data kor (pokok) dan modul (rinci) dalam aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja.

Susenas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963 dengan mengumpulkan data konsumsi pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya Susenas mengalami beberapa kali perubahan baik isian maupun periode pengumpulannya. Pada tahun 2011, untuk pertama kalinya pengumpulan data Susenas konsumsi pengeluaran rumah tangga dilaksanakan secara triwulanan.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, Susenas dilakukan empat kali setahun guna mengidentifikasi pengaruh musiman beberapa komoditi yang dikonsumsi rumah tangga. Pola pengumpulan data ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan data untuk penghitungan angka kemiskinan dan memantau konsumsi/pengeluaran rumah tangga PDB/PDRB triwulanan.

Metodologi Pengumpulan Data

Dalam satu tahun, besaran sampel Susenas mencakup 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi, dengan distribusi sampel setiap triwulan sebanyak 75.000 rumah tangga. Triwulanan pertama, kedua, ketiga dan keempat berturut-turut dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Data disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi. Sedangkan data hasil kumulatif pencacahan selama empat triwulan dapat disajikan sampai tingkat kabupaten/kota.

Data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan dalam Susenas 2014 terbagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan. Konsumsi pengeluaran makanan dirinci menjadi 215 komoditas, masing-masing berupa data 'banyaknya' dan 'nilainya'. Untuk konsumsi bukan makanan umumnya yang dikumpulkan hanya data nilainya, kecuali untuk beberapa jenis pengeluaran seperti penggunaan listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak (BBM) yang juga dikumpulkan data kuantitasnya.

Susenas didesain memiliki 3 modul yaitu Modul konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga; Modul Sosial, Budaya dan Pendidikan; serta Modul Perumahan dan Kesehatan. Setiap modul dilaksanakan 3 tahun

sekali. Pelaksanaannya secara triwulanan, yaitu setiap tahun dilakukan pengumpulan data pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Berikut merupakan metodologi pengumpulan data Susenas:

1. Metode *sampling* yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata.
2. Jenis rancangan sampel adalah *probability*
3. Penarikan sampel dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:
 - (a) Tahap pertama, memilih wilayah pencacahan secara PPS (*Probability Proportional to Size*) dengan muatan banyaknya rumah tangga SP 2010. Kemudian wilcah tersebut dialokasikan secara acak ke dalam empat triwulan.
 - (b) Tahap kedua, memilih blok sensus secara PPS dengan muatan banyaknya rumah tangga SP2010-RBL1 dari wilcah terpilih di setiap triwulan, antara lain:
 - Satu BS pada setiap wilcah terpilih untuk Susenas triwulan II dan III.
 - Satu BS pada setiap wilcah terpilih Susenas triwulan IV dan I.
 - (c) Tahap ketiga, memilih 10 rumah tangga biasa secara sistematis dari setiap BS terpilih untuk Susenas berdasarkan hasil pemutakhiran rumah tangga SP2010.
4. *Sampling frame* adalah kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan rumah tangga berupa daftar rumah tangga biasa hasil pemutakhiran rumah tangga SP2010-C1 dengan menggunakan Daftar VSEN11-P hasil pemutakhiran. Pemilihan sampel rumah tangga secara sistematis sampling dilakukan oleh Pengawas menggunakan Daftar VSEN11-P. Ukuran sampel rumah tangga yang harus dipilih di setiap blok sensus adalah 10 rumah tangga. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan dari BPS-RI setelah hasil pemutakhiran dimasukkan.
5. Alokasi sampel adalah mencakup 75.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 514 Kab/Kota di Indonesia. Data hasil pencacahan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi.

Tujuan dan Manfaat

Secara umum tujuan pengumpulan data melalui Susenas adalah menyediakan data tentang kesejahteraan rumah tangga mencakup antara lain pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli.

Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

- Menyediakan data pokok tentang kesejahteraan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi keberhasilan pembangunan.
- Menyediakan data rinci tentang kesejahteraan anggota rumah tangga seperti pendidikan, kesehatan, fertilitas/KB, dan data kependudukan menurut golongan umur, jenis kelamin, dan status perkawinan.

Variabel

Variabel Basis Data Susenas ditunjukkan dalam *Lampiran C*.



Data Potensi Desa (Podes)

Potensi Desa (Podes) merupakan salah satu sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia. Data Podes tersebut dapat diolah sehingga dihasilkan informasi penting berbasis wilayah untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh, data Podes digunakan untuk mengidentifikasi desa yang masih diklasifikasikan sebagai desa tertinggal dan diduga sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin. Sejalan dengan waktu, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk bisa dipenuhi.

Pendataan Podes telah dilaksanakan sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 10 tahun, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. Namun demikian sejak tahun 2008, pendataan Podes dilaksanakan secara independen dari rangkaian kegiatan sensus. Kuesioner yang digunakan juga sebanyak tiga jenis, yaitu kuesioner desa, kuesioner kecamatan dan kuesioner kabupaten/kota. Hal ini dilakukan demi menjaga akurasi dan kelengkapan data.

Pada tahun berakhir '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhir '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru. Pelaksanaan Podes 2014 diharapkan bisa membantu perencanaan kegiatan Sensus Ekonomi pada tahun 2016.

Metodologi Pengumpulan Data

Kuesioner yang digunakan dalam Podes 2014 sebanyak 3 (tiga) jenis, yaitu a) kuesioner desa; b) kuesioner kecamatan; dan c) kuesioner kabupaten/kota. Hal ini dilakukan demi menjaga akurasi dan kelengkapan data. Data yang dikumpulkan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data kor dan modul. Pertanyaan Kor selalu muncul pada setiap pelaksanaan Podes yang memuat data terkait infrastruktur, sumber daya alam, kejadian bencana, kelembagaan desa, dan sebagainya. Sebagian besar pertanyaan kor di Podes 2014 telah tersedia dan dapat dipergunakan bagi Sensus Ekonomi, sehingga tidak diperlukan lagi pertanyaan yang dikhususkan sebagai modul.

Podes 2014 dilaksanakan selama bulan April 2014, mencakup seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yaitu: desa (termasuk nagari khusus di Sumatera Barat), kelurahan, dan UPT yang selanjutnya disebut dengan desa. Selain itu, Podes 2014 juga mencakup seluruh kecamatan dan kabupaten/kota. Desa yang didata pada Podes 2014 adalah desa operasional yang memenuhi tiga syarat, yaitu:

- Memiliki wilayah dengan batas yang jelas
- Penduduk menetap di wilayah desa
- Ada pemerintahan desa

Data Podes 2014 dikumpulkan menggunakan instrumen yang kompleks dan terdiri dari lima jenis kuesioner. Data yang tersedia disimpan dalam satu file yang merupakan gabungan dari lima data (lima jenis kuesioner). Agar data Podes 2014 dapat dimanfaatkan secara optimal, maka pengguna data dibekali dengan buku Panduan Penggunaan Data ini.

Tujuan dan Manfaat

Data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sumber data berbasis wilayah.

Lebih dari itu pendataan Podes juga dimaksudkan untuk memberikan indikasi awal tentang fakta-fakta potensi wilayah, infrastruktur/fasilitas serta kondisi sosial ekonomi dan budaya di setiap desa/kelurahan. Secara umum tujuan Pendataan Podes adalah:

1. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah.
2. Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah.
3. Melengkapi penyusunan kerangka sampling (*sampling frame*) untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut.
4. Menyediakan data bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi desa (*urban dan rural*), desa tertinggal dan tidak tertinggal, dan sebagainya.
5. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*Small Area Statistics*).

Variabel

Variabel Basis Data Podes ditunjukkan dalam *Lampiran C*.

Basis Data Terpadu (BDT)

Basis data terpadu (BDT) adalah basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah sampai sekitar 40 persen penduduk atau rumah tangga di Indonesia. BDT bukan data kemiskinan, karena tidak hanya berisi data penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) namun juga penduduk rentan miskin (di atas garis kemiskinan sampai 40 persen penduduk dengan tingkat sosial-ekonomi terendah).

Informasi yang terdapat dalam basis data terpadu berisi informasi nama, alamat, serta karakteristik rumah tangga sampai informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40 persen penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Status kesejahteraan rumah tangga yang ada dalam BDT ini telah diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya, kemudian data rumah tangga dalam BDT dikelompokkan peringkat kesejahteraan dalam desil (kelompok persepuluhan, dalam hal ini 10 persen), jika total penduduk (100 persen) terbagi ke dalam 10 desil, maka dalam data BDT akan terdapat 4 desil, karena BDT hanya mencakup 40 persen penduduk.

Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah, desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10 sampai 20 persen terendah, desil 3 berisi rumah tangga dalam kelompok antara 20 sampai 30 persen, dan desil 4 berisi rumah tangga dalam kelompok antara 30 sampai 40 persen.

Penggunaan istilah sangat miskin, miskin, dan hampir miskin diperoleh dari nilai garis kemiskinan yang berasal dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas). Pengelompokan rumah tangga dengan istilah sangat miskin, miskin, dan hampir miskin memiliki kemungkinan untuk bergeser dari tahun ke tahun



menyesuaikan hasil Susenas pada tahun tersebut. Penggunaan istilah desil dalam BDT lebih sesuai sebagai basis data target atau sasaran program, penggunaan istilah desil lebih sesuai untuk rentang pemanfaatan 3 tahunan (rentang waktu yang lazim digunakan dalam pendataan BDT). Pelaksanaan Podes 2014 diharapkan bisa membantu perencanaan kegiatan Sensus Ekonomi pada tahun 2016.

Penyajian data BDT dapat berupa data nama dan alamat, dan juga tersedia data sebaran (agregat), mulai tingkat nasional, sebaran provinsi, dan sebaran kabupaten/kota bahkan sebaran sampai wilayah terkecil seperti kecamatan dan desa/kelurahan.

Metodologi Pengumpulan Data

Inti Basis Data Terpadu mengacu pada informasi yang dihimpun melalui PPLS 2011 yang dilaksanakan oleh BPS bulan Juli 2011. Metodologi PPLS 2011 dirancang oleh BPS bekerjasama dengan TNP2K untuk mengakomodasi perbaikan terhadap beberapa pendataan serupa (PSE 2005 dan PPLS 2008). PPLS 2011 mendata jauh lebih banyak rumah tangga dari PPLS 2008 dan dilakukan perbaikan metodologi untuk memperhitungkan karakteristik spesifik masing-masing kabupaten/kota.

Selain PPLS 2011, Basis Data Terpadu juga memanfaatkan sumber informasi lain seperti karakteristik desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, data kementerian/program, yang relevan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan karakteristik tertentu (misalnya tingkat kemiskinan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan).

Pengembangan Basis Data Terpadu dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendataan PPLS 2011
 - Pemilihan variabel PPLS 2011 melalui proses seleksi dengan kriteria yang wajib dipenuhi seperti dapat berfungsi sebagai indikator kemiskinan, ketersediaan sumber data, mudah diamati saat pendataan dan tidak mudah dimanipulasi.
 - Penyusunan daftar sementara rumah tangga yang akan didata berdasarkan sumber data rumah tangga miskin yang tersedia.
 - Perbaikan dan penambahan data rumah tangga berdasarkan informasi dari Ketua Rukun Tetangga, masyarakat miskin dan pengamatan langsung.
2. Pengolahan data: secara teknis dan ilmiah dengan metode *Proxy-Means Testing (PMT)* yang digunakan di banyak negara, untuk mengestimasi kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga dan data konsumsi rumah tangga.
3. Pemutakhiran data: data dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan validitas data termasuk, misalnya, perkembangan dalam hal perubahan administratif (pemekaran wilayah). Direncanakan pendataan PPLS akan dilaksanakan setiap tiga tahun (berikutnya pada tahun 2014) untuk memutakhirkan seluruh data termasuk status kesejahteraan masing-masing rumah tangga.

Tujuan dan Manfaat

BDT dapat digunakan untuk:

1. Melakukan analisis perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan. Data ini

dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40 persen masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Bagi perencana program pemerintah (pusat maupun daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

2. Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial. Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka BDT dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah tangga bagi instansi pemerintah yang mengelola program perlindungan sosial. Sejak tahun 2012, BDT telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat bagi pelaksana program Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun program-program lain yang dikelola pemerintah daerah.
3. Selain itu Informasi dalam BDT dapat pula digunakan untuk memperkirakan jumlah individu/rumah tangga miskin dan individu/rumah tangga rentan miskin pada kelompok-kelompok berikut:
 - Individu pada kelompok demografi tertentu, misalnya anak-anak, orang lanjut usia, orang-orang usia produktif, perempuan kepala rumah tangga, dan sebagainya,
 - Status partisipasi pendidikan, yaitu jumlah anak-anak yang bersekolah atau tidak bersekolah menurut usia jenjang pendidikan (7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun),
 - Individu yang bekerja menurut bidang pekerjaan,
 - Individu penyandang cacat dan sakit kronis,
 - Status kepemilikan rumah/tempat tinggal,
 - Sumber air minum dalam rumah tangga,
 - Sumber bahan bakar untuk memasak dalam rumah tangga,
 - Dsb.

Variabel

Variabel Basis Data Terpadu (BDT) ditunjukkan dalam *Lampiran C*.





Kerangka Analisis Situasi Kemiskinan

Analisis situasi kemiskinan merupakan bagian dari proses perencanaan yang bertujuan menghasilkan prioritas masalah, prioritas intervensi, prioritas wilayah, dan prioritas rumah-tangga sasaran penanggulangan kemiskinan. Prioritas masalah menjelaskan *apa* isu yang paling strategis untuk ditangani. Prioritas intervensi menjelaskan *bagaimana* cara yang paling relevan untuk menangani masalah. Prioritas wilayah menjelaskan *dimana* wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi) yang perlu diutamakan dalam penanganan masalah. Sedangkan, prioritas rumah-tangga sasaran menunjukkan *siapa* yang harus diutamakan sebagai penerima manfaat dari intervensi kebijakan.

Mengidentifikasi Prioritas Masalah

Masalah kemiskinan dapat dianalisis dengan mengacu kepada indikator-indikator hasil (*outcome/impact*) pembangunan, khususnya yang sesuai dengan komitmen global (MDGs), nasional (RPJMN) atau lokal (RPJMD). Sedangkan 'bobot' dan 'kecenderungan' dari suatu masalah disimpulkan dari penilaian terhadap aspek-aspek posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas, dan relevansi perkembangan indikator yang menyatakan masalah yang bersangkutan. Sehingga dengan menerapkan paket kriteria itu pada semua indikator dalam suatu bidang tertentu, maka prioritas masalah di bidang itu akan ditunjukkan oleh indikator yang paling bermasalah dalam bobot dan kecenderungan tersebut.

Posisi relatif dianalisis untuk menjawab pertanyaan dimana posisi suatu daerah dalam capaian sebuah indikator dibandingkan dengan kinerja daerah-daerah lain, terutama dalam wilayah atau kawasan yang sama. Kriteria ini juga diterapkan untuk melihat dimana posisi capaian tersebut terhadap target yang harus dipenuhi menurut MDGs, RPJMN atau RPJMD.

Analisis perkembangan antarwaktu berguna untuk menjawab pertanyaan dimana posisi capaian terakhir sebuah indikator dibandingkan dengan capaian di masa sebelumnya, terutama sejak suatu kebijakan diterapkan atau masa pemerintahan dimulai. Perbandingan juga perlu dilakukan terhadap capaian terbaik (terburuk) yang pernah terjadi di masa lalu. Analisis ini juga untuk mengamati pola perubahan capaian indikator dari tahun ke tahun dalam suatu periode, apakah cenderung fluktuatif atau konsisten meningkat (menurun).

Efektivitas perbaikan suatu indikator juga penting untuk dipelajari. Analisis ini dapat menjelaskan apakah selama periode tertentu—lima tahun masa pemerintahan misalnya—arah perubahan capaian suatu indikator cenderung membaik atau memburuk dibandingkan periode sebelumnya. Secara grafis, efektivitas (inefektivitas) akumulasi intervensi ditunjukkan oleh kemiringan garis kecenderungan (*trendline*) dari capaian indikator hasilnya selama periode yang diamati. Makin tajam kemiringan garis itu makin efektif (tidak efektif) akumulasi intervensi yang dimaksud.

Aspek lain yang perlu dianalisis dari capaian sebuah indikator di suatu daerah adalah relevansi pola perubahannya dari waktu ke waktu dengan perkembangan yang terjadi di tingkat wilayah yang lebih luas. Dengan analisis ini dapat diperoleh gambaran apakah keberhasilan (kegagalan) suatu daerah dalam memperbaiki capaian indikator tertentu merupakan hal khusus di daerah yang bersangkutan (*local specific*), atau merupakan suatu kondisi yang secara umum terjadi di tingkat wilayah yang lebih luas.

Contoh 'indikator-indikator utama' untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan di setiap bidang (dimensi)

pembangunan diperlihatkan pada Tabel 3-1.

Tabel 3-1. Indikator Utama Kemiskinan Menurut Bidang

BIDANG/ DIMENSI	INDIKATOR UTAMA	TUJUAN DAN SASARAN MDGs	SUMBER DATA
EKONOMI			
	Tingkat Kemiskinan (%)	Tujuan 1 – Sasaran 1A	Susenas
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tujuan 1 – Sasaran 1A	Susenas
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	Tujuan 1 – Sasaran 1A	Susenas
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)	Tujuan 1 – Sasaran 1A	Susenas
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tujuan 1 – Sasaran 1B	Sakernas
	Inflasi		
INFRASTRUKTUR DASAR			
	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	Tujuan 7 – Sasaran 7C	Susenas
	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	Tujuan 7 – Sasaran 7C	Susenas
	Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%)		Podes
	Proporsi Rumah Tangga dengan Kepemilikan Hak atas Rumah/Tempat Tinggal (%)	Tujuan 7 – Sasaran 7D	Podes
	Proporsi Rumah Tinggal Layak Huni (%)	Tujuan 7 – Sasaran 7D	Podes
KETAHANAN PANGAN			
	Perkembangan Harga Beras (Rp)	Tujuan 1 – Sasaran 1C	Kementerian Perdagangan
	Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (Rp)	Tujuan 1 – Sasaran 1C	Kementerian Perdagangan
	Produksi bersih serealia	Tujuan 1 – Sasaran 1C	
KESEHATAN			
	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Tujuan 4 – Sasaran 4A	Riskesdas
	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Tujuan 4 – Sasaran 4A	Riskesdas
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	Tujuan 4 – Sasaran 4A	Susenas
	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Tujuan 5 – Sasaran 5A	Riskesdas
	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	Tujuan 5 – Sasaran 5A	Susenas
	Cakupan pelayanan antenatal K1-K4 (%)	Tujuan 5 – Sasaran 5A	Susenas
	Wanita menikah usia 15-19 berkontrasepsi (%)	Tujuan 5 – Sasaran 5B	Riskesdas
	Tingkat kelahiran usia muda (per 1000 wanita usia 15-19) (%)	Tujuan 5 – Sasaran 5B	Susenas
	Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (%)	Tujuan 5 – Sasaran 5B	Riskesdas
	Jumlah Kasus baru AIDS (Jiwa)	Tujuan 6 – Sasaran 6A	Susenas
	Jumlah Kasus baru HIV (Jiwa)	Tujuan 6 – Sasaran 6A	Susenas
	Prevalensi malaria per 1000 penduduk (%)	Tujuan 6 – Sasaran 6C	Riskesdas
	Angka penemuan pasien TBC positif baru (%)	Tujuan 6 – Sasaran 6C	Riskesdas



	Angka keberhasilan pengobatan TBC	Tujuan 6 – Sasaran 6C	Riskesdas
	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Tujuan 1 – Sasaran 1C	Riskesdas
PENDIDIKAN			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44 (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ (%)	Tujuan 2 – Sasaran 2A	Susenas
	Rasio APM perempuan/laki-laki (%)	Tujuan 3 – Sasaran 3A	Susenas
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki (%)	Tujuan 3 – Sasaran 3A	Susenas
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	Tujuan 3 – Sasaran 3A	DPR

Mengidentifikasi Determinan Masalah: Prioritas Intervensi

Masalah kemiskinan harus diatasi dari akarnya. Oleh karena itu determinan atau faktor risiko yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan sebagai prioritas harus ditelusuri sedemikian rupa sehingga dapat mengarahkan fokus intervensi kebijakan.

Setiap indikator utama yang bermasalah dapat berkaitan dengan beberapa 'indikator pendukung' sebagai determinannya. Indikator-indikator pendukung ini dapat dikelompokkan ke dalam determinan sisi penawaran (*supply side*), yaitu faktor ketersediaan sarana dan prasarana layanan publik; dan determinan sisi permintaan (*demand side*) yang menyangkut pemanfaatan sarana dan prasarana itu oleh masyarakat, selain faktor lingkungan dan perilaku sosial yang relevan.

Tabel 3-1 memperlihatkan berbagai indikator pendukung dari masalah morbiditas sebagai salah satu indikator utama kemiskinan dalam dimensi kesehatan. Berdasarkan pengalaman, perubahan angka morbiditas hampir selalu berkaitan dengan kombinasi determinan-determinan tersebut.

Tabel 3-2. Determinan Masalah Kesehatan Terkait Indikator Angka Morbiditas

Prioritas Masalah (Indikator Utama)	Determinan Sisi Penawaran (Indikator Pendukung)	Determinan Sisi Permintaan (Indikator Pendukung)
Angka morbiditas	<p>Faktor ketersediaan fasilitas layanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit • Praktek dokter/poliklinik • Puskesmas/Pustu • Praktek nakes • Dsb. <p>Faktor ketersediaan tenaga kesehatan terlatih:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter • Bidan • Perawat • Dsb. <p>Faktor pelaksanaan program:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan program pembiayaan/asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal) • Pemberian Fe pada Ibu Hamil • Penimbangan Balita • Pemberian PMT • Dsb. 	<p>Faktor lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vektor penyakit (endemis malaria, DBD) • Sumber air bersih (Leding meteran, sumur bor/pompa, mata air terlindung, air sungai, air hujan) • Fasilitas BAB (jamban sendiri, umum, tidak ada) • Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Tangki/SPAL, kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang) • Lantai rumah (ubin, plester, kayu, bambu, tanah) • Sampah (industri, rumah-tangga, pasar, rumah potong hewan) • Dsb. <p>Faktor perilaku sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan (health believe) • Gaya hidup (pola konsumsi, kebiasaan merokok, perilaku seks yang tidak aman, dsb.) • Pengobatan sendiri • Pertolongan persalinan • Pemberian ASI pada bayi • Pemanfaatan (kartu peserta) program pembiayaan/asuransi kesehatan • Dsb.

Cara sederhana untuk mengarahkan kepada prioritas intervensi adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut untuk menganalisis setiap indikator pendukung:

- Bagaimana arah dan berapa besar perubahan capaian indikator pendukung sejak intervensi dilakukan?
- Apakah tingkat capaian hasil perubahan tersebut telah memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan?
- Apakah perubahan capaian tersebut telah berdampak pada capaian indikator utama yang menjadi tujuan (*goal*) intervensi?

Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan deskriptif yang dapat dijawab dengan membandingkan capaian indikator pendukung sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Sedangkan pertanyaan kedua adalah pertanyaan normatif yang dapat dijawab dengan membandingkan capaian terakhir indikator pendukung dengan standar pelayanan publik yang berlaku, misalnya SPM (Standar Pelayanan Minimum), sebagai acuan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil memenuhi kewajibannya dalam aspek pelayanan publik yang dinyatakan oleh indikator pendukung. Contoh SPM masing-masing untuk



bidang Pendidikan dan Kesehatan disajikan pada Tabel 3-3 dan Tabel 3-4.

Tabel 3-3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar)

Bentuk Pelayanan	Standar Pelayanan Minimum (SPM)
<p>Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. 3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. 4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. 5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. 6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. 7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. 9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan. 10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, dan 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
<p>Pelayanan Pendidikan Dasar oleh satuan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
 - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu
 - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu, atau
 - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu
7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester.
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Sumber: Permendikbud No. 23 Tahun 2013



Tabel 3-4. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan

Bentuk Pelayanan	Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% pada tahun 2015. 2. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2015. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015. 4. Cakupan pelayanan ibu nifas 90% pada tahun 2015. 5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2010. 6. Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010. 7. Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> (UCI) 100% pada tahun 2010. 8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada tahun 2010. 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% pada tahun 2010. 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010. 11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada tahun 2010. 12. Cakupan peserta KB aktif 70% pada tahun 2010. 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada tahun 2010. 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada tahun 2015.
Pelayanan Kesehatan Rujukan oleh Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada tahun 2015. 16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota 100% pada tahun 2015.
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	<ol style="list-style-type: none"> 17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% pada tahun 2015.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 18. Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015.

Sumber: Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008

Kotak 3.1 *Causal tracing strategies* untuk menentukan prioritas intervensi

1. **Causal list inference:** Jika diketahui bahwa hasil (*outcome/impact*) tertentu hampir selalu disebabkan oleh faktor A, B, C atau D; dan dalam kasus yang dianalisis B, C dan D tidak terjadi, maka dapat diyakini bahwa A merupakan faktor penyebab.

Daerah X memahami bahwa Angka Kematian Balita (AKABA) akan menurun jika mereka melakukan intervensi pengurangan jarak Puskesmas terdekat (A), peningkatan rasio dokter per 100.000 penduduk (B), peningkatan persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (C), dan pengurangan prevalensi balita gizi buruk (D). Jika Daerah X hanya menempuh upaya intervensi A dan berhasil menurunkan AKABA, maka Daerah X hampir dapat memastikan

bahwa pengurangan jarak Puskesmas menyebabkan AKABA menurun.

2. **Modus operandi inference:** Teknik ini berguna jika ditemukan lebih satu kemungkinan faktor penyebab. Jika diketahui bahwa hasil (*outcome/impact*) tertentu hampir selalu disebabkan oleh determinan A, B, C atau D, dan dalam kasus yang dianalisis ternyata C dan D tidak terjadi, yang mengerucutkan faktor penyebab kepada A atau B. Dan selain itu diketahui bahwa hanya modus operandi untuk A yang pernah terbukti, maka hampir dapat diyakini bahwa A merupakan faktor penyebab. Terlebih jika dapat ditunjukkan bahwa modus operandi untuk A sangat berbeda dengan modus operandi untuk B.

Selain pengurangan jarak Puskemas terdekat (A), Daerah X juga mengupayakan intervensi peningkatan rasio dokter per 100.000 penduduk (B). Jika Daerah X mengetahui dari pengalaman Daerah Y bahwa AKABA di sana ternyata tidak menurun ketika dokter diberi tunjangan alat transportasi dan rasio dokter meningkat, maka Daerah X bisa hampir memastikan bahwa pengurangan jarak Puskesmas adalah faktor yang menyebabkan AKABA menurun. Inferensi ini diperkuat oleh alasan bahwa modus operandi pengurangan jarak Puskesmas sangat berbeda dengan modus operandi peningkatan rasio dokter.

3. **Temporal precedence:** Pengaruh ditemukan hanya setelah intervensi dilakukan, sebelumnya tidak. Jika terjadi peningkatan AKABA dan Daerah X mulai mengambil inisiatif pengurangan jarak Puskesmas sehingga kemudian AKABA menurun, Daerah X bisa mempercayai bahwa kemungkinan ada keterkaitan antara pengurangan jarak Puskesmas dan penurunan AKABA. Jika Daerah X telah mengupayakan pengurangan jarak Puskesmas sebelum AKABA meningkat dan kemudian ternyata AKABA mengalami peningkatan, maka intervensi tersebut kemungkinan tidak menyebabkan penurunan AKABA.
4. **Constant conjunction:** Pengaruh ditemukan di semua tempat dimana intervensi dilakukan. Misalkan Daerah X bertemu dengan banyak daerah lain di wilayahnya dan membagi pengalaman (hipotesis) bahwa pengurangan jarak Puskesmas menyebabkan AKABA menurun. Daerah lain mencoba intervensi ini dan menemukan bukti bahwa AKABA menurun. Maka dapat diyakini bahwa pengurangan jarak Puskesmas menyebabkan AKABA menurun.
5. **Strength of association:** Perubahan yang ditemukan lebih kuat terjadi di tempat dimana program dilaksanakan daripada di tempat lain dimana yang ada adalah determinan lain.

Jika daerah-daerah di suatu wilayah menggunakan berbagai bentuk intervensi untuk mengurangi AKABA, dan daerah-daerah yang menggunakan intervensi pengurangan jarak Puskesmas menjadi yang paling berhasil mengurangi AKABA, maka penurunan AKABA dapat dikaitkan dengan pengurangan jarak Puskesmas.



6. **Biological gradient:** Makin kuat intervensi, makin kuat perubahan yang dihasilkan.

Misalkan daerah menggunakan lebih dari satu cara untuk mengurangi AKABA. Ketika daerah mengerahkan alokasi sumberdaya yang besar untuk pengurangan jarak Puskesmas, AKABA menurun. Sebaliknya ketika intervensi itu dilakukan dengan sumberdaya yang kecil, AKABA tidak menurun. Maka penurunan AKABA dapat dikaitkan dengan pengurangan jarak Puskesmas.

7. **Coherence:** Keterkaitan antara intervensi dan perubahan yang terjadi cocok secara logika dengan hal lain yang diketahui menyangkut intervensi dan hasilnya.

Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Morbiditas terbukti menurun ketika jarak Puskesmas dikurangi. Dari sini secara logis dapat disimpulkan bahwa pengurangan jarak Puskesmas dapat mengurangi resiko kesehatan masyarakat dan oleh sebab itu intervensi dapat diterapkan untuk masalah AKABA.

8. **Analogy.** Pola keterkaitan antara intervensi dan perubahan yang dihasilkan menyerupai pola keterkaitan yang lazim antara suatu bentuk intervensi dan pengaruhnya.

Daerah X mengetahui pengalaman daerah lain yang selalu menempuh strategi mendekatkan jarak fasilitas kesehatan untuk mengatasi setiap masalah kesehatan masyarakat. Dari sini daerah X dapat membuat suatu analogi bahwa masalah AKABA bisa diatasi dengan mendekatkan jarak fasilitas kesehatan.

Sumber: Diadaptasi dari Imas and Rist (2009), *The Road to Results*, The World Bank.

Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yang merupakan pertanyaan keterkaitan atau sebab-akibat, umumnya diperlukan upaya pengumpulan data kuantitatif secara terstruktur sebagai bahan analisis. Tetapi jika evaluasi dilakukan melalui metoda kaji cepat, atau jika skala intervensi (program/kegiatan) cukup kecil, atau jika suatu bentuk intervensi baru pertama kali diterapkan, pengumpulan data seperti itu tidak memungkinkan. Akibatnya sampel data akan terlalu kecil untuk melakukan analisis statistik. Dalam kondisi demikian, suatu model argumen logis dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga prioritas intervensi bisa dikerucutkan dengan mengeliminasi determinan (hipotesis) pembandingnya. Model yang dimaksud adalah "*causal tracing strategies*" yang mencakup delapan argumen logis (**Kotak 3.1**).

Mengidentifikasi Prioritas Wilayah

Selain oleh ketepatan fokus intervensi, efektivitas penanggulangan kemiskinan ditentukan pula oleh ketepatan lokus dari intervensi yang bersangkutan. Pasalnya, karakteristik dan bobot permasalahan terkait kemiskinan akan cenderung berbeda antarwilayah, terlebih jika antarwilayah itu terdapat perbedaan yang signifikan dalam karakteristik ekonomi, demografi, sosial-budaya maupun karakteristik fisik (geografis). Wilayah-wilayah dengan kondisi yang relatif tertinggal dalam capaian indikator utama

sekaligus indikator pendukungnya harus memperoleh perhatian khusus di dalam skema pembangunan di daerah.

Prioritisasi wilayah kantong kemiskinan ini sebenarnya bukan hal baru dalam program pembangunan di Indonesia. Di masa lalu, program Inpres Desa Tertinggal (IDT) telah menggunakan pendekatan target kewilayahan (*geographical targeting*). Dalam batas tertentu program PNPM Mandiri juga mengadopsi pendekatan ini. Sebagai contoh, pada tahun 2013 alokasi BLM di setiap kecamatan telah ditentukan berdasarkan kondisi kemiskinan di setiap kecamatan dan desa/kelurahan, selain faktor kemampuan keuangan pusat dan daerah. Data rujukan dalam hal ini adalah Podes tahun 2011 dan BDT hasil PPLS 2011.

Mengidentifikasi Prioritas Rumah-Tangga Sasaran

Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, terutama melalui perlindungan sosial, bisa lebih efektif jika secara langsung ditujukan kepada rumah-tangga atau individu miskin dan rentan sesuai karakteristik kebutuhan mereka. Jika faktor kurangnya biaya pendidikan teridentifikasi sebagai akar masalah rendahnya angka partisipasi sekolah di suatu wilayah, maka anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di wilayah itu harus menjadi sasaran utama beasiswa pendidikan. Demikian pula, jika tingginya angka morbiditas diketahui bersumber dari masalah tingginya proporsi penduduk dengan pengobatan sendiri—karena ketidakmampuan untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan—maka warga miskin dan rentan di wilayah tersebut harus menjadi sasaran utama program jaminan kesehatan.

Sejak BDT diluncurkan pada awal tahun 2012, penetapan rumah-tangga/keluarga/individu sasaran program-program perlindungan sosial nasional seperti Raskin, Jamkesmas, BSM, PKH, PPA-PKH, dan berbagai program perlindungan sosial daerah telah mengacu kepada basis data mikro tersebut. Program Raskin, sebagai contoh, menggunakan BDT untuk menysasar 17,5 juta rumah-tangga miskin dan rentan pada tahun 2012, dan kemudian 15,5 juta rumah-tangga tersebut pada tahun 2013 dan 2014. Sementara program Jamkesmas, yang berevolusi menjadi JKN pada tahun 2014, menggunakan basis data tersebut untuk menentukan 86,4 juta individu sebagai peserta atau penerima bantuan iuran program.





Contoh Kasus

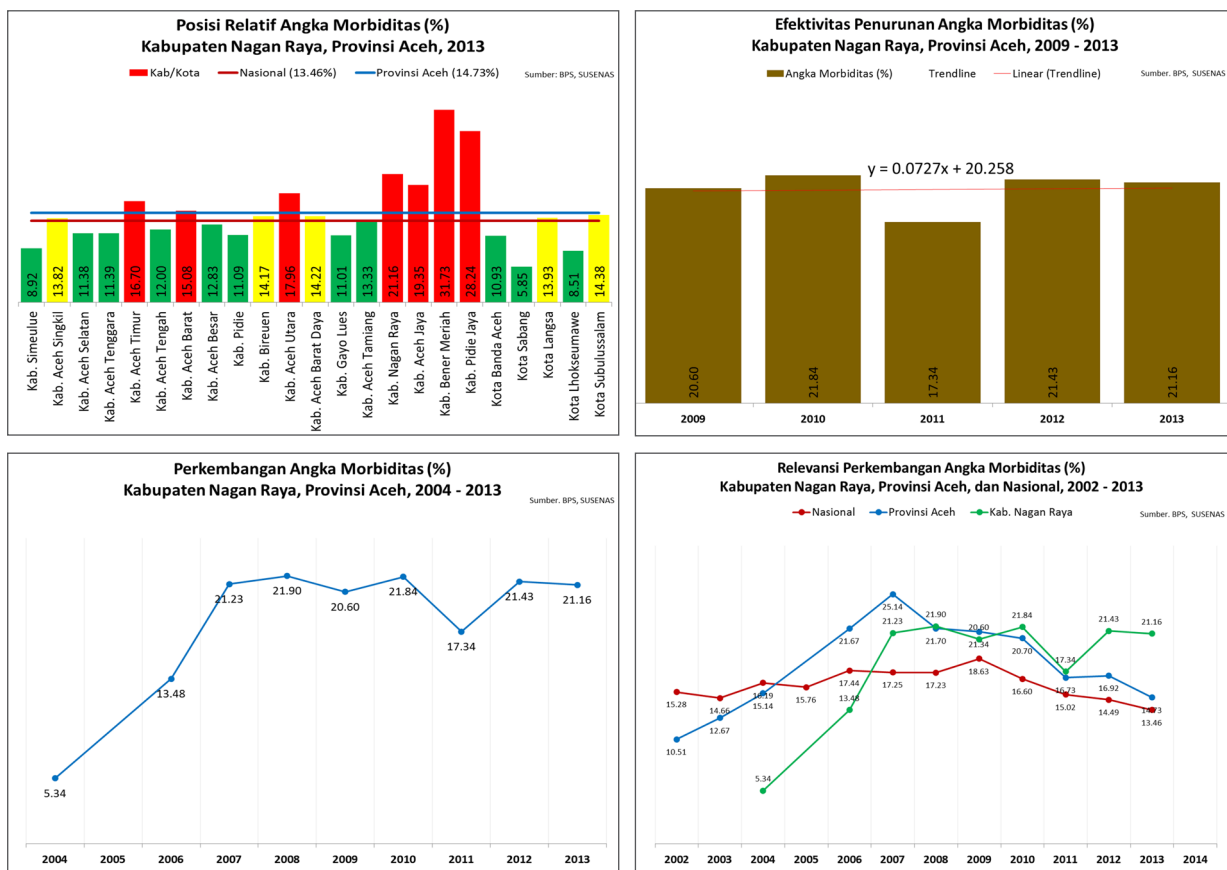
Dengan memanfaatkan data yang tersedia di dalam aplikasi, di bawah ini ditampilkan empat contoh kasus analisis situasi kemiskinan daerah dalam empat bidang yang berbeda, yakni kesehatan, pendidikan, prasarana dasar dan ketenagakerjaan. Setiap kasus menunjukkan bagaimana data diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penentuan prioritas masalah, prioritas intervensi, prioritas wilayah dan prioritas rumah-tangga sasaran program/kegiatan.

Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi (21,75% pada tahun 2013). Dalam dimensi kesehatan, profil kemiskinan yang paling menonjol di daerah ini ditunjukkan oleh tingginya angka morbiditas. Pada tahun 2013, indikator tersebut menunjukkan angka 21,16%, jauh di atas kinerja Provinsi Aceh (14,73%) maupun Nasional (13,46%) (Gambar 4-1a).

Dalam lima tahun terakhir, catatan terbaik Nagan Raya adalah 17,34%, yang terjadi pada tahun 2011 (Gambar 4-1b). Secara umum selama periode tersebut, angka morbiditas yang tidak cenderung menurun mencerminkan rendahnya efektivitas intervensi pembangunan untuk memperbaiki kinerja indikator yang bersangkutan (Gambar 4-1c). Arah perkembangan ini juga tidak relevan dengan dinamika di tingkat Provinsi Aceh maupun Nasional dimana terjadi pola penurunan yang konsisten dalam angka morbiditas (Gambar 4-1d).

Gambar 4-1. Identifikasi Masalah Terkait Angka Morbiditas di Kabupaten Nagan Raya



Keseluruhan analisis di atas menggambarkan bahwa tantangan perencanaan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan angka morbiditas di Kabupaten Nagan Raya tidak sederhana. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang faktor-faktor penentu atau determinan dari masalah yang ada, baik yang berhubungan dengan ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan (*supply side*), maupun yang menyangkut akses atau pemanfaatannya oleh masyarakat (*demand side*).

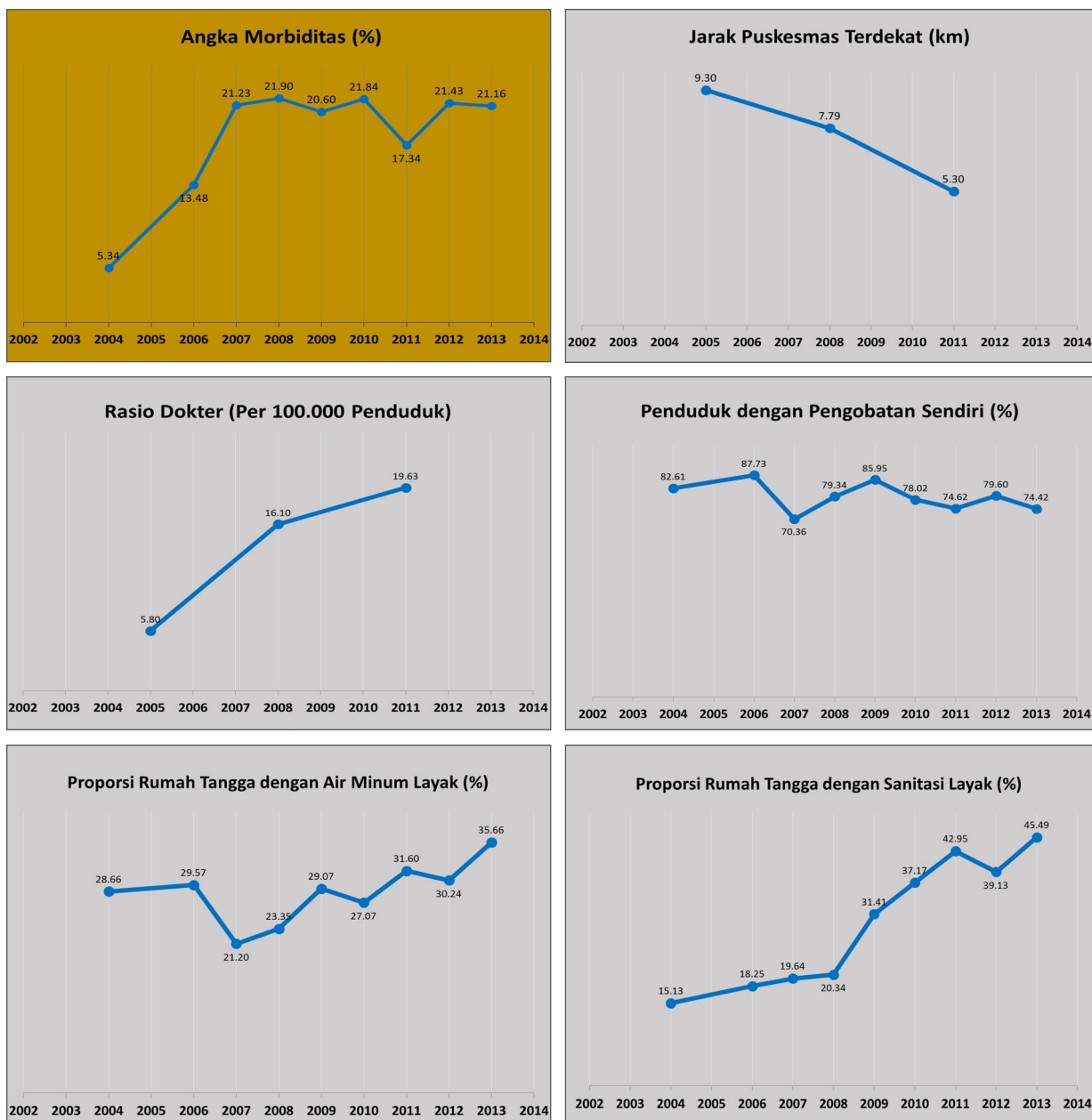
Data menunjukkan bahwa indikator-indikator pendukung, yang lazim dikaitkan dengan indikator utama angka morbiditas, umumnya menunjukkan tren perbaikan. Jarak Puskesmas terdekat telah menurun hingga 5.30 Km. Namun demikian, untuk memaksimalkan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat jaraknya ke tempat tinggal penduduk seyogyanya lebih didekatkan (Gambar 4-2b). Rasio Dokter per 100.000 Penduduk, walaupun terus bertambah dari tahun ke tahun, juga belum mencapai tingkat ketersediaan yang ideal yaitu minimum 40 dokter per 100.000 penduduk (Gambar 4-2c).

Di lain pihak akses masyarakat pada prasarana dasar air minum dan sanitasi yang layak juga masih harus ditingkatkan. Proporsi penduduk dengan akses terhadap dua prasarana yang sangat menentukan kesehatan masyarakat ini di Nagan Raya masih di bawah 50% (Gambar 4-2e,f).

Di samping itu, tinggi rendahnya angka morbiditas dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, yang dalam batas tertentu dapat dijelaskan oleh indikator Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri. Menurut data tahun 2013, tiga dari empat penduduk di Nagan Raya masih mengandalkan pengobatan sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan mereka. Kondisi yang tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir (Gambar 4-2d).

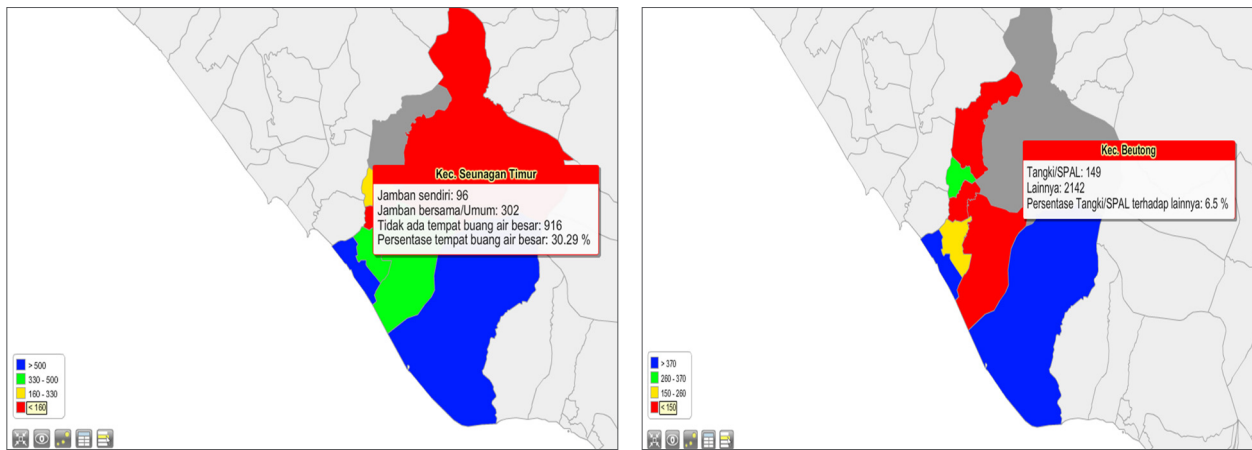


Gambar 4-2. Keterkaitan masalah angka morbiditas dengan sebagian indikator pendukungnya di Kabupaten Nagan Raya



Terkait masalah ketersediaan prasarana sanitasi yang layak, BDT secara spesifik menunjukkan, misalnya, dari total rumah-tangga miskin dan rentan (Desil 1, 2 dan 3) di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, hanya 96 rumah-tangga yang memiliki jamban sendiri. Sebanyak 302 rumah-tangga menggunakan jamban bersama/umum. Selebihnya, terdapat 916 atau 70% rumah-tangga yang sama sekali tidak memiliki akses pada tempat buang air besar (Gambar 4-3a). Masalah lain terlihat pada ketiadaan tempat pembuangan akhir tinja yang memenuhi ketentuan sanitasi yang layak di sebagian besar rumah-tangga miskin dan rentan. Di Kecamatan

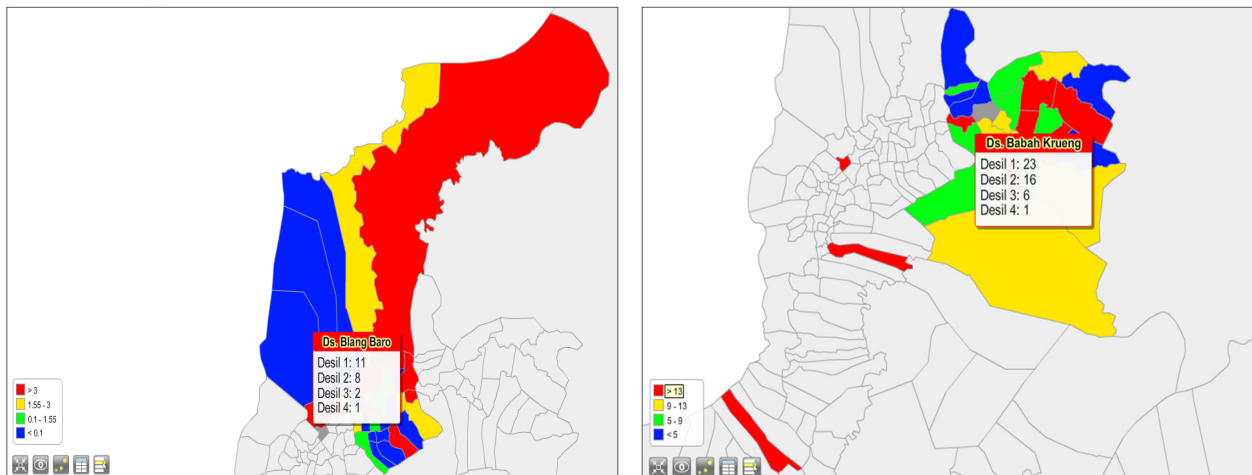
Gambar 4-3. Ketersediaan fasilitas BAB di Kecamatan Seunagan Timur dan TPAT di Kecamatan Beutong



Beutong, misalnya, persentase rumah-tangga tersebut yang menggunakan Tangki/SPAL jauh di bawah 10% (Gambar 4-3b).

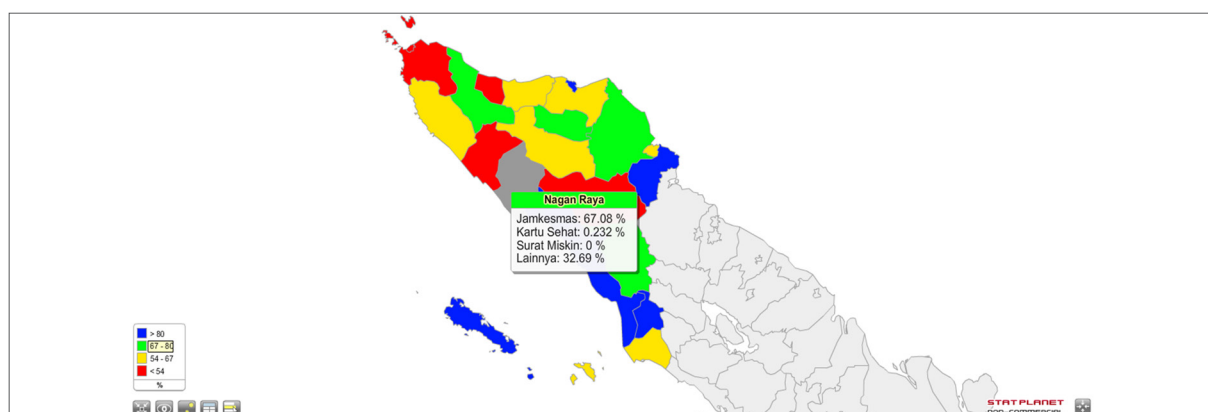
Jika ditinjau antar-desanya di Kecamatan Seunagan Timur, salah satu desa yang paling bermasalah dengan ketersediaan fasilitas BAB di lingkungan warga miskin dan rentan adalah Desa Blang Baro (Gambar 4-4a). Sedangkan di Kecamatan Beutong, dalam hal ketersediaan tempat pembuangan akhir tinja, Desa Babah Krueng salah satu desa yang perlu menjadi lokus utama penyelesaian masalah (Gambar 4-4b).

Gambar 4-4. Ketersediaan fasilitas BAB dan tempat pembuangan akhir tinja di Desa Blang Baro di Seunagan Timur dan Desa Babah Krueng di Beutong, Kabupaten Nagan Raya



Menganalisis lebih jauh masalah proporsi penduduk dengan pengobatan sendiri, indikator ini dapat dikaitkan dengan tingkat kepesertaan dan utilisasi program Jamkesmas. Di Kabupaten Nagan Raya, pada tahun 2011 sekitar 67 % dari masyarakat miskin dan rentan (Desil 1 sampai Desil 4) sudah memiliki kartu Jamkesmas (Gambar 4-4)—meskipun manfaat kartu ini harus dinilai dari tingkat utilitasnya oleh masyarakat yang bersangkutan. Secara lebih spesifik, Tabel 4-1.

Gambar 4-5. Jumlah Individu Peserta Program Jamkesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013



menunjukkan contoh distribusi individu sasaran program Jamkesmas antar-desa di Kecamatan Seunagan Timur.

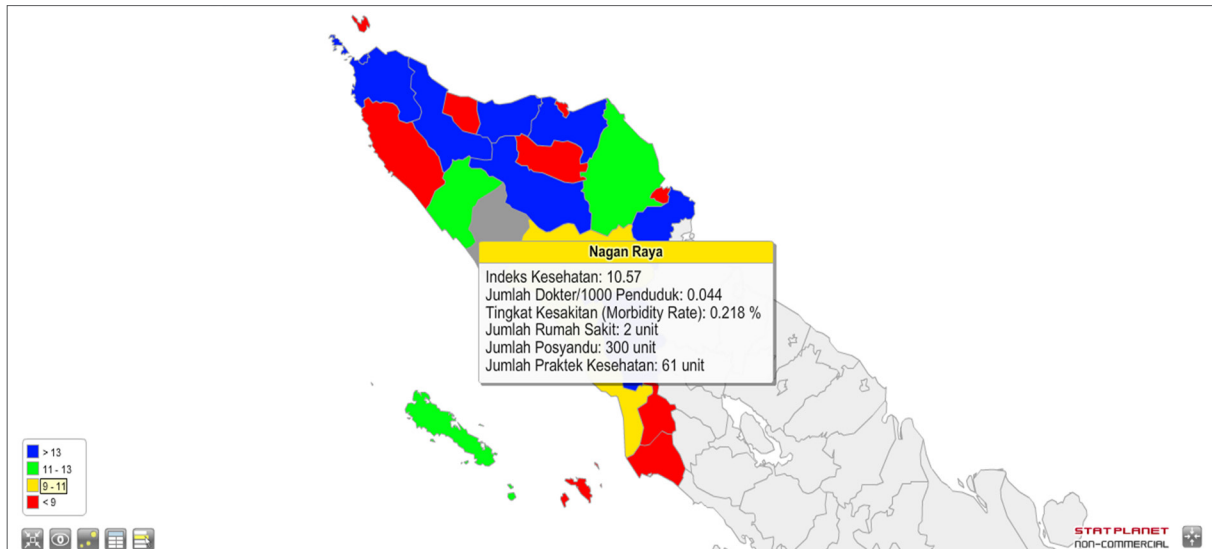
Tabel 4-1. Distribusi Individu Sasaran Jamkesmas Antar-Desa di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya

KECAMATAN	DESA	JUMLAH INDIVIDU DESIL 1-4	JUMLAH INDIVIDU SASARAN JAMKESMAS
SEUNAGAN TIMUR	BLANG LANGO	115	115
	TUWI MEULEUSONG	51	51
	BLANG GEUDONG	120	120
	SAWANG MANE	216	216
	LHOK PANGE	224	224
	KEUDE NEULOP	100	100
	MON BATEUNG	355	355
	IE BEUDOH	162	162
	SUAK PERBONG	147	147
	BLANG ARA KMP.	99	99
	KRUENG KULU	174	174
	COT PUNTI	122	122
	KEUDE BLANG ARA	164	164
	PEULEUKUNG	120	120
	SAPENG	182	182
	MEUGAT MEUH	109	109
	BLANG PANYANG	251	251
	UTEUN PULO	336	336
	KEUDE LINTEUNG	259	259
	PAYA	96	96
	COT TEUKU DEK	76	76
	LHOK MESJID	355	355
	BLANG PREH	95	95
	BLANG BAYU	171	171
	MEURANDEH SUAK	200	200
	COT DIRUI	40	40
	COT MANYANG	211	211
	KABU BAROH	192	192
	KABU TUNONG	247	247
	COT GUD	307	307
PULO TEUNGOH	169	169	
KILA	131	131	
KANDEH	109	109	
BLANG TENGGU	69	69	

Sumber: BDT

Evaluasi terhadap pengaruh kepesertaan program Jamkesmas di atas dapat juga dikaitkan secara langsung dengan faktor ketersediaan rumah sakit, Posyandu dan praktek kesehatan di daerah (Gambar 4-5).

Gambar 4-6. Ketersediaan Sarana/Prasarana Kesehatan di Kabupaten Nagan Raya

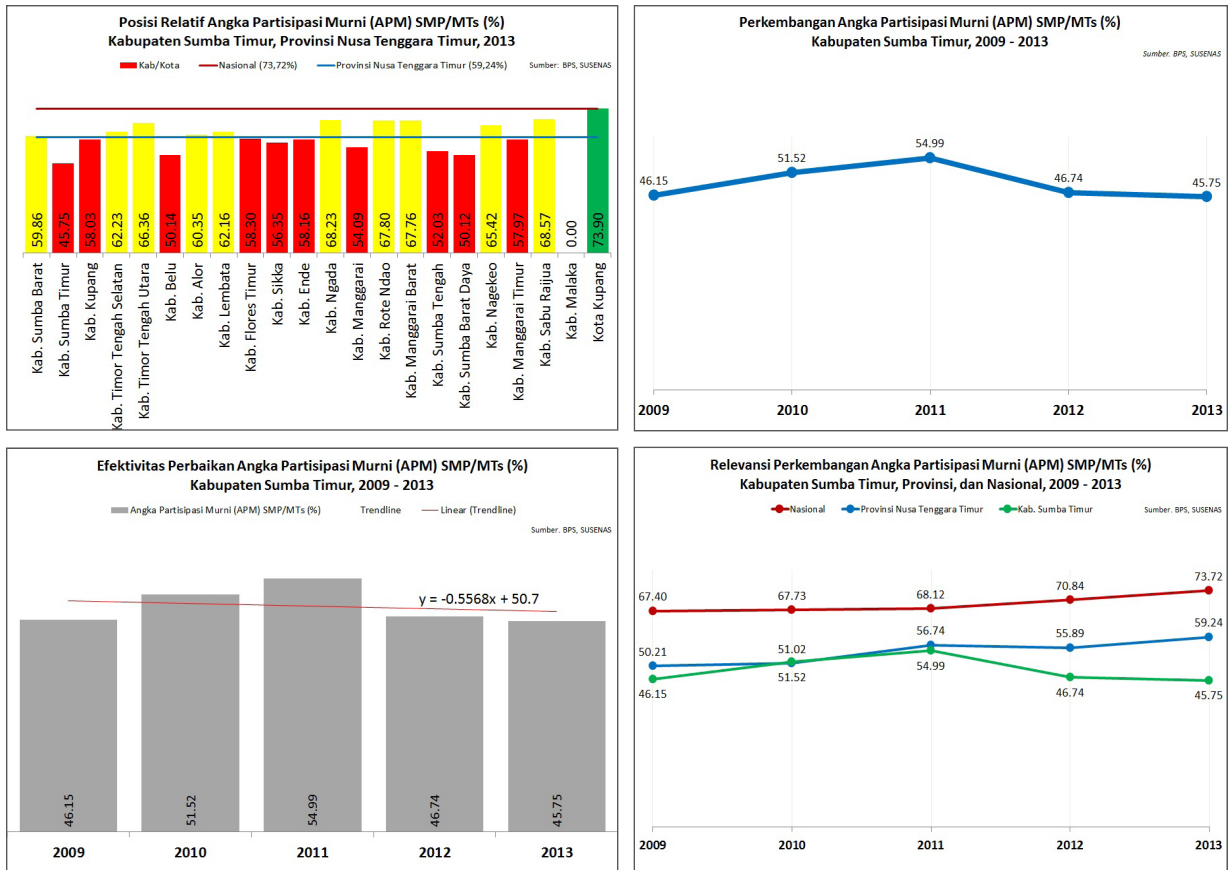


Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

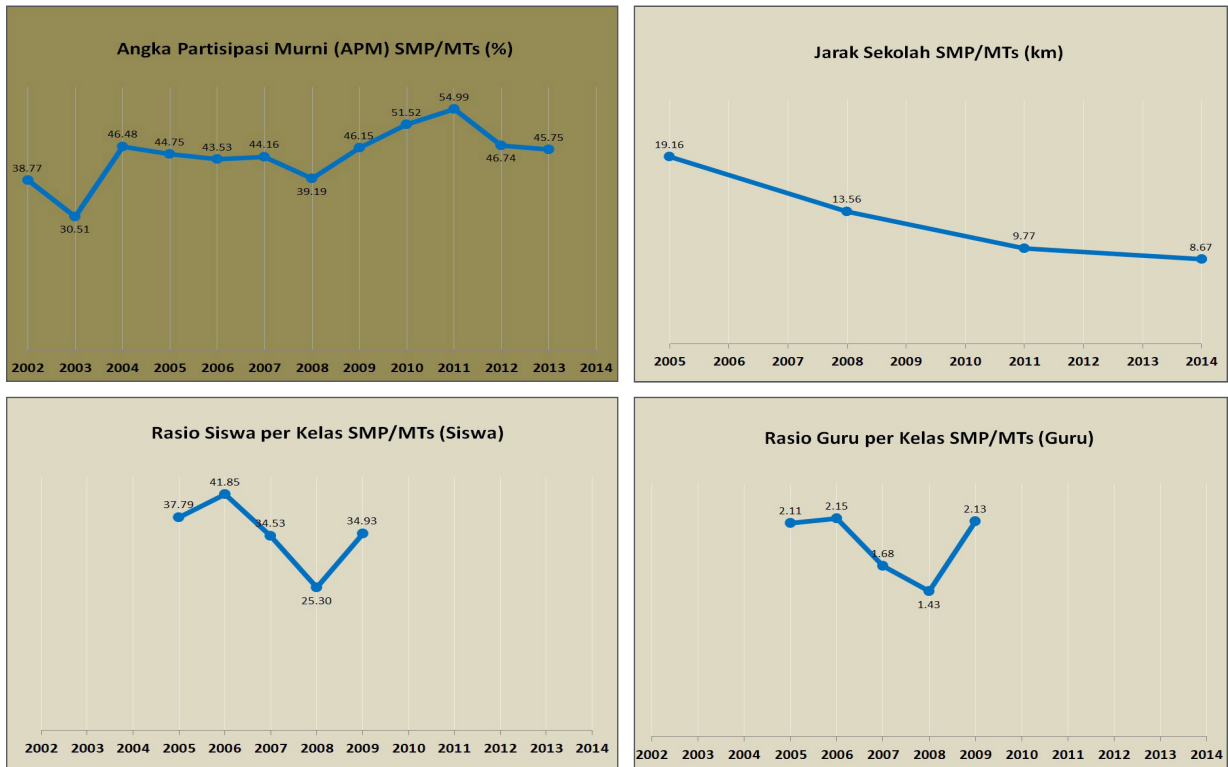
Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi (28,58 % pada tahun 2013). Dalam dimensi pendidikan, profil kemiskinan yang menonjol salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, dari berbagai indikator dalam bidang pendidikan, setelah dilakukan analisis sederhana terkait posisi relatif, perkembangan antar-waktu, relevansi dan efektivitas maka capaian APM SMP/MTs menjadi salah satu indikator yang harus diprioritaskan penyelesaiannya oleh Pemerintah Sumba Timur. Capaian APM SMP/MTs pada tahun 2013 adalah 45,75 %, jauh dibawah rata-rata capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur (59,24 %), dan jauh dibawah rata-rata capaian Nasional (75,72 %) pada tahun yang sama (Gambar 4-7a).

Dalam lima tahun terakhir, capaian terbaik APM SMP/MTs Kabupaten Sumba Timur ini adalah pada tahun 2011 (Gambar 6.2.b) dengan capaian 54,99 %. Secara umum selama periode yang sama, capaian APM SMP/MTs cenderung fluktuatif, dan pada tahun terakhir (2013) capaiannya turun dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya efektivitas intervensi untuk mencapai hasil yang di maksud (Gambar 4-7b dan 4-7c). Arah perkembangan indikator ini juga tidak relevan dengan dinamika di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Nasional. Pada saat APM SMP/MTs di level provinsi dan nasional membaik, perkembangan di Kabupaten Sumba Timur justru memburuk (Gambar 4-7d).

Gambar 4-7. Identifikasi Masalah Terkait APM SMP/MTs di Kabupaten Sumba Timur

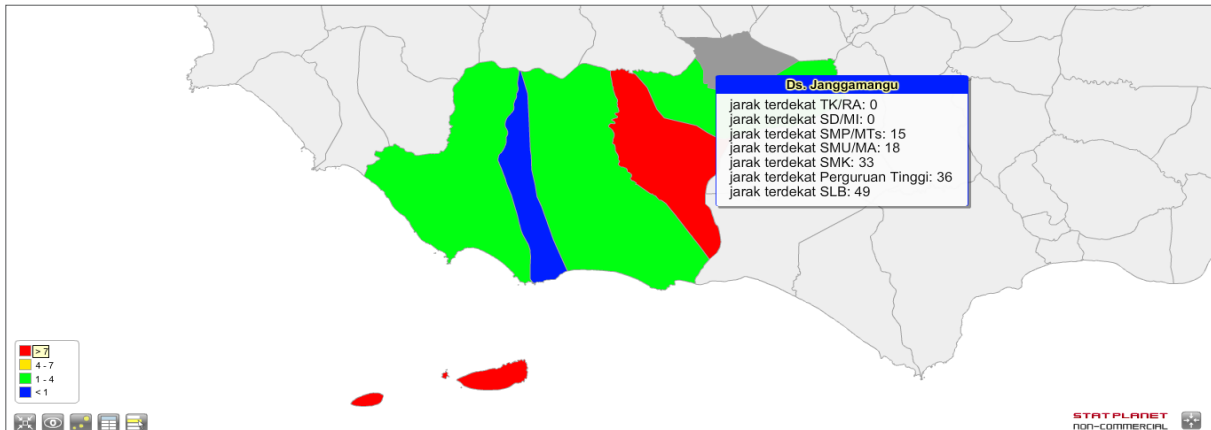


Gambar 4-8. Keterkaitan masalah APM SMP/MTs dengan sebagian Indikator Pendukungnya di Kabupaten Sumba Timur



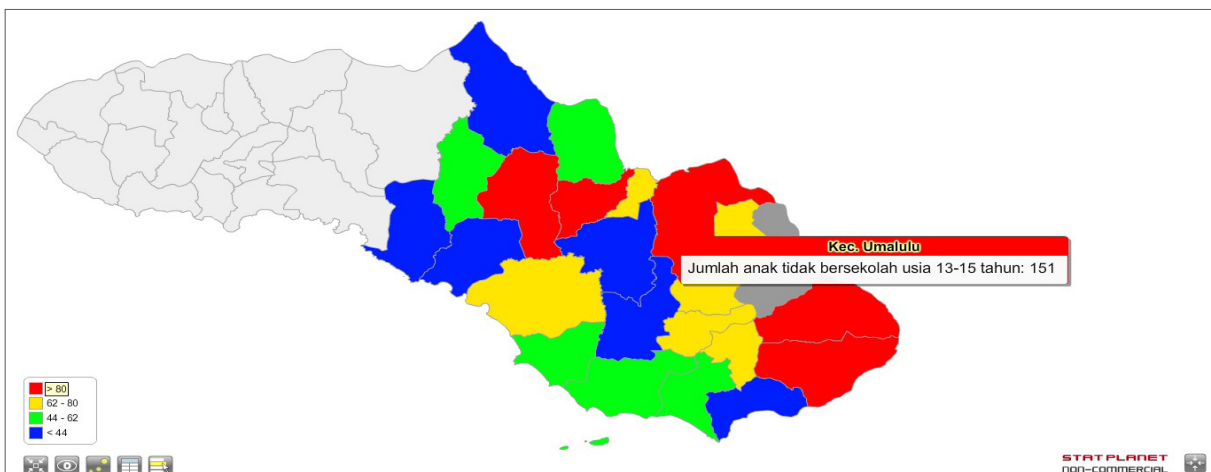
Dari analisis keterkaitan antara APM SMP/MTs dan indikator-indikator pendukungnya, terlihat bahwa salah satu determinan penyebab rendahnya capaian APM SMP/MTs tersebut adalah jarak sekolah. Indikator ini mengalami perbaikan dalam sepuluh tahun terakhir dan telah mencapai 8,7 Km (Gambar 4-8). Namun jarak ini masih lebih jauh dibandingkan SPM Pendidikan Dasar untuk jarak maksimal SMP/MTs, yaitu 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Disagregasi data ke tingkat desa menunjukkan bahwa desa dengan jarak SMP/MTs terjauh di Sumba Timur adalah Desa Janggamangu (15 Km), seperti terlihat pada Gambar 4-9.

Gambar 4-9. Jarak SMP/MTs menurut desa di Kabupaten Sumba Timur

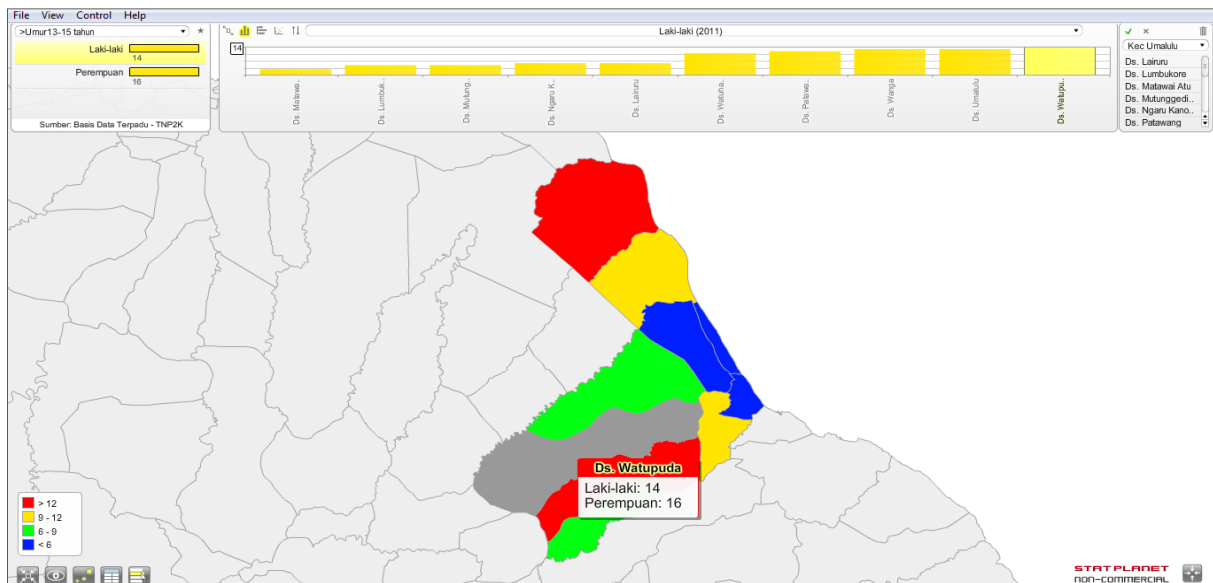


Untuk keperluan intervensi pengurangan beban biaya pendidikan, informasi tentang jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah dari 30% masyarakat dengan status kesejahteraan terrendah perlu dijadikan acuan. Di Kabupaten Sumba Timur, terdapat beberapa kecamatan yang sangat menonjol dalam jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, yaitu yang terbanyak di Kecamatan Umalulu (151 anak), disusul Kecamatan Kota Waingapu (106), Kecamatan Rindi (94), Kecamatan Nggaha Oriangu (85), Kecamatan Pahunga Lodu (82), dan Kecamatan Pandawai (81), seperti terlihat pada Gambar 4-10. Analisis dengan data BDT ini dapat dilanjutkan untuk mengetahui distribusi masalah antar-desa. Secara lebih detail, Gambar 4-11 menunjukkan distribusi jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah antar-desa di Kecamatan Umalulu, menurut jenis kelaminnya.

Gambar 4-10. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah menurut kecamatan di Kabupaten Sumba Timur



Gambar 4-11. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah menurut desa di Kecamatan Umalulu



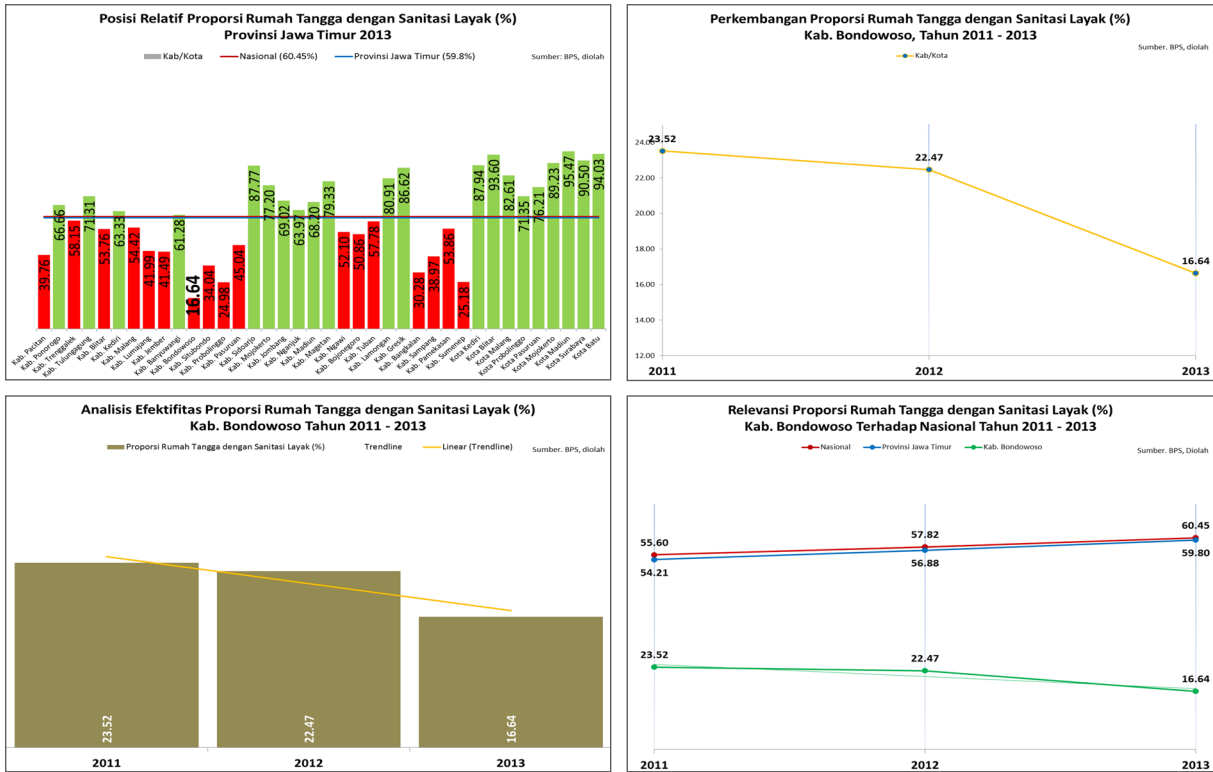
Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Prasarana Dasar Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Data Susenas 2013 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bondowoso 15.23%, kondisi ini tidak lebih baik dari angka untuk Provinsi Jawa Timur (12.73%) maupun Nasional (11.47%) pada tahun yang sama.

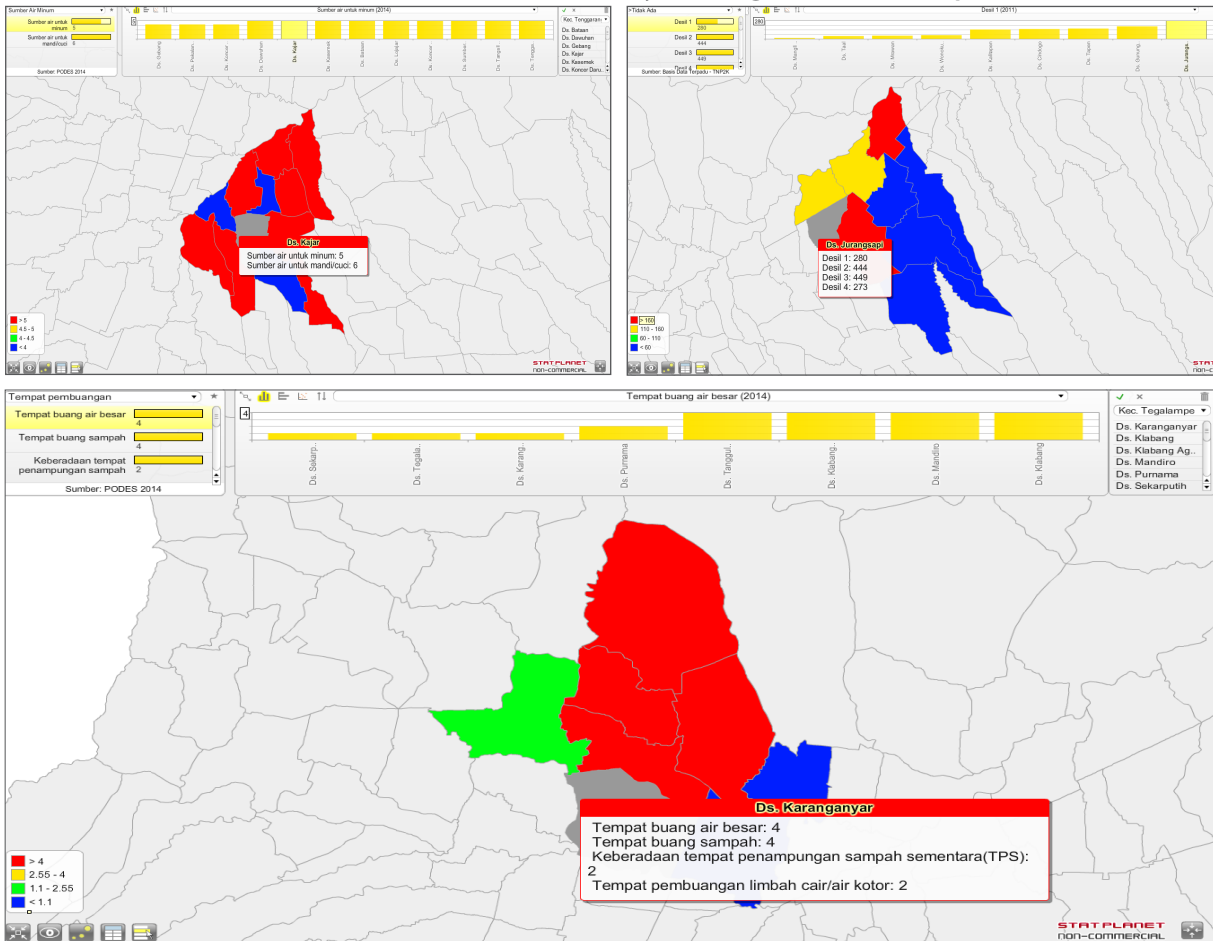
Dalam dimensi prasarana dasar, akses pada sanitasi layak merupakan salah satu masalah utama terkait kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Menurut data Susenas 2013, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, masih sangat rendah (16.64%) jika dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Timur (59.8%) dan Nasional (60.45%) (Gambar 4.12a). Kondisi ini diperburuk oleh kondisi menurunnya capaian tersebut dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 23.52% pada tahun 2011 16.63% pada tahun 2013 (Gambar 4.13b).

Masalah sanitasi layak di Kabupaten Bondowoso dapat dikaitkan dengan determinan tempat pembuangan sampah, fasilitas buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, dan sumber air mandi/cuci. Dari data Podes dapat diketahui desa-desa yang menonjol dalam masalah-masalah tersebut. Misalnya, Desa Kajar untuk faktor sumber air mandi/cuci; Desa Karanganyar untuk faktor tempat pembuangan sampah; dan Desa Jurangsapi untuk faktor ketiadaan fasilitas BAB di tingkat rumah-tangga (Gambar 4.13). Wilayah-wilayah ini merupakan bagian dari prioritas lokus untuk masing-masing intervensi yang bersangkutan dalam rangka mencapai hasil peningkatan proporsi rumah-tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Bondowoso.

Gambar 4-12. Identifikasi Masalah Terkait Akses pada Sanitasi Layak di Kabupaten Bondowoso



Gambar 4-13. Kondisi terkait determinan sanitasi layak di tingkat desa di Kabupaten Bondowoso

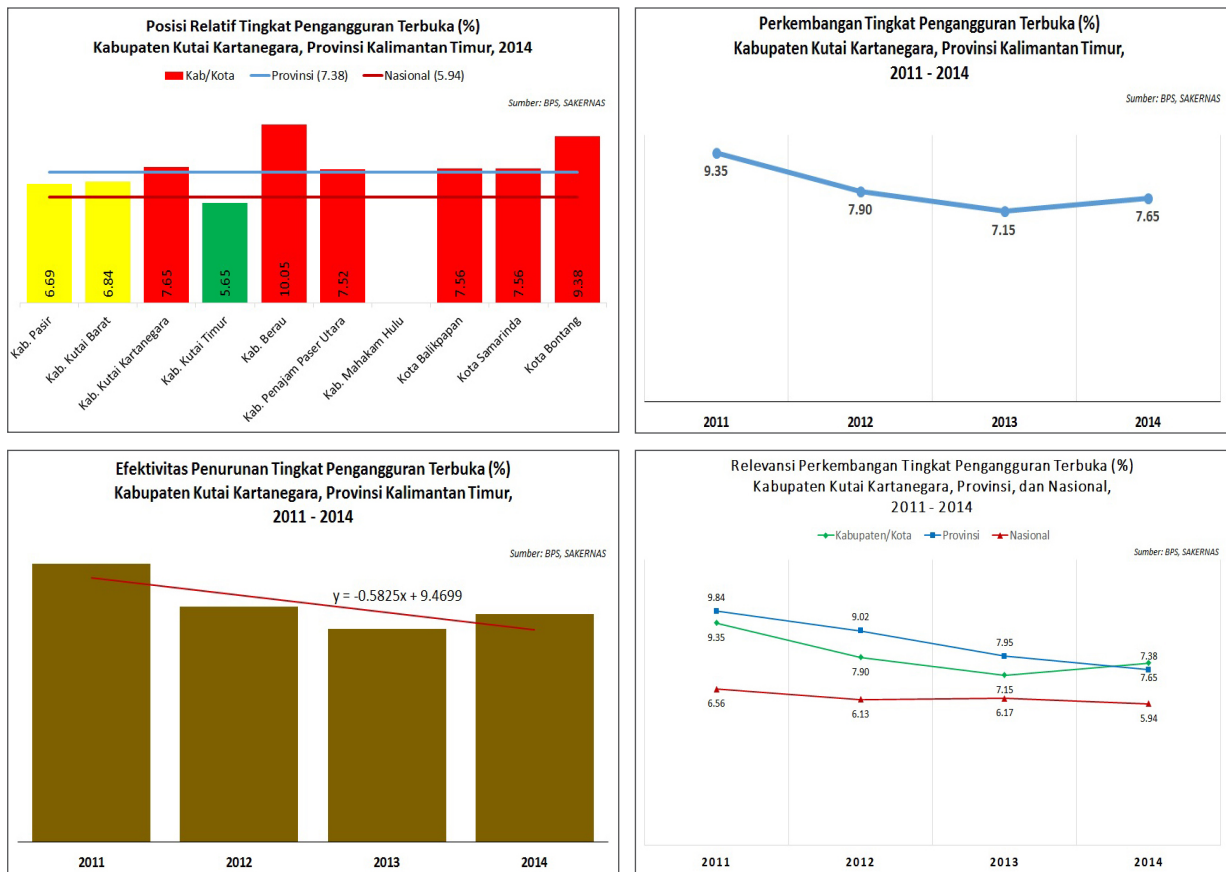


Analisis Situasi Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Kutai Kartanegara sudah mencapai 7,52 %, hanya sedikit di atas angka Provinsi Kalimantan Timur (6,38 %) dan jauh di bawah angka nasional (11,47 %).

Namun demikian, Kutai Kartanegara menghadapi masalah pengangguran yang relatif tinggi. Pada tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kutai Kartanegara sebesar 7,65 %, lebih tinggi daripada angka Provinsi Kalimantan Timur (7,38 %) dan angka nasional (5,94 %) (Gambar 4-14a). Kondisi ini menempatkan Kutai Kartanegara sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ketiga di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Berau (10,05 %) dan Kota Bontang (9,38 %).

Gambar 4-14. Identifikasi Karakteristik Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara



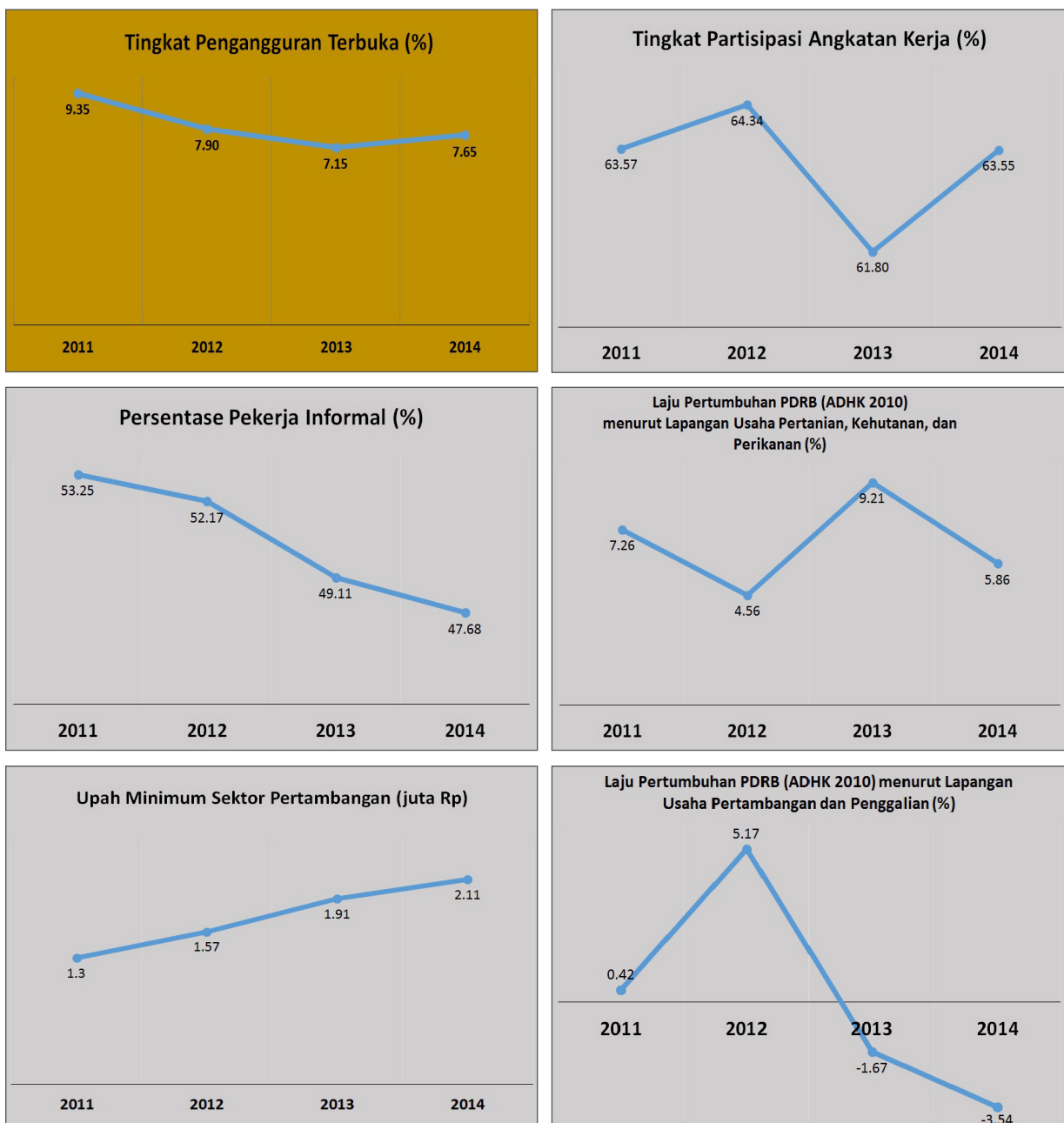
Selain capaian terakhir yang tergolong tinggi, perkembangan TPT di Kutai Kartanegara menunjukkan kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014, pada saat kecenderungan di tingkat provinsi maupun nasional menunjukkan penurunan (Gambar 4-14d).

Determinan masalah pengangguran di Kutai Kartanegara dapat dikaitkan dengan pesatnya pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di daerah ini pada tahun 2014 mencapai 318.499 jiwa, hasil

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa indikator pendukung lain yang dapat dikaitkan dengan masalah TPT ini antara lain adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, dan persentase pekerja informal dan formal.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (angkatan kerja yang bekerja) masih relatif rendah. Pada tahun 2014 angkanya masih 63,55 % setelah sempat menurun pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari angkatan kerja di Kutai Kartanegara belum bekerja. Fakta lain menunjukkan persentase pekerja informal di Kutai Kartanegara semakin menurun proporsinya dibandingkan pekerja pada sektor formal. Artinya sektor formal mendominasi sektor pekerjaan yang digeluti penduduk Kutai Kartanegara, sektor formal menjadi tujuan pencari kerja, oleh karena itu proporsi sektor formal terus berkembang.

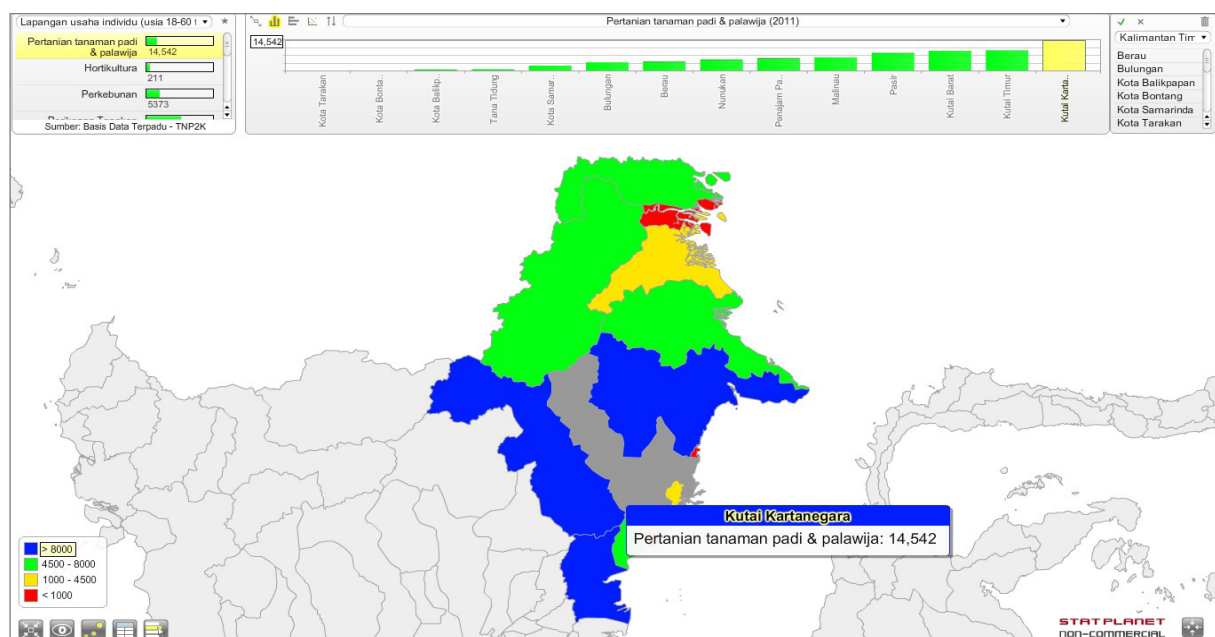
Gambar 4-15. Keterkaitan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Sebagian Indikator Pendukungnya di Kabupaten Kutai Kartanegara



Sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kutai Kartanegara pada tahun terakhir kontribusinya mengalami penurunan (laju pertumbuhannya negatif). Padahal sektor ini merupakan tujuan utama angkatan kerja karena upah minimum pada sektor ini yang lebih tinggi dari upah minimum kabupaten (UMK). Masalah ini berpotensi menciptakan masalah pengangguran baru atau angkatan kerja yang sedang mencari kerja di sektor ini berpotensi menjadi pengangguran yang menunggu pekerjaan, karena di sisi lain sektor informal tampaknya tidak cukup menarik bagi pencari kerja. Hal ini terlihat dari turunnya proporsi pekerja pada sektor informal (Gambar 4-14), yang tampaknya didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

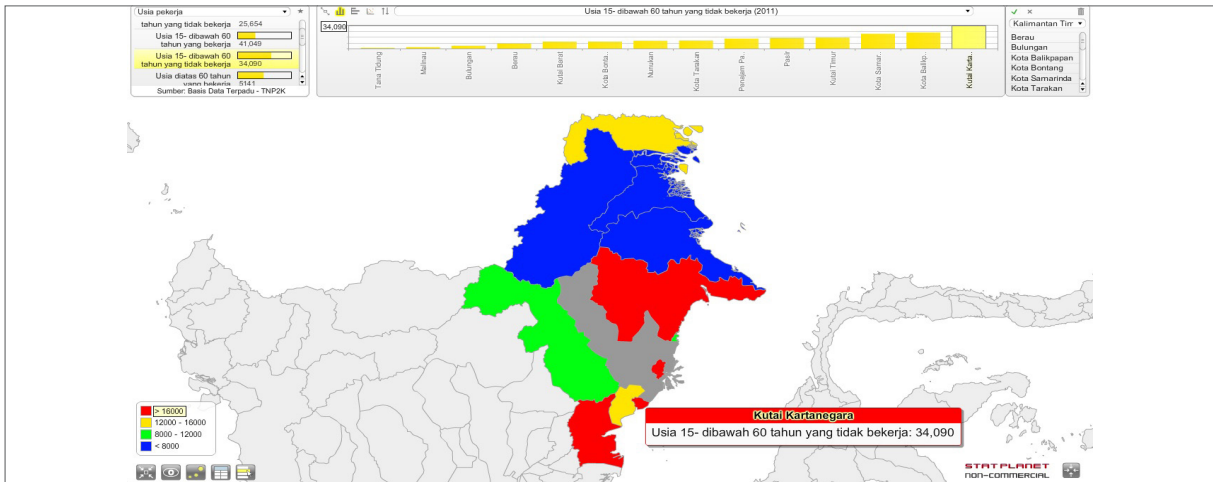
Jika ditelusuri lebih dalam, Data BDT menunjukkan sektor pertanian, terutama pertanian tanaman padi dan palawija, adalah sektor yang banyak digeluti penduduk miskin dan rentan di Kutai Kartanegara. Di daerah ini ada 14.542 penduduk usia 18-60 tahun, yang termasuk dalam kelompok penduduk nasional dengan kondisi sosial ekonomi 30% terendah, menggeluti lapangan usaha pertanian tanaman padi dan palawija (Gambar 4-15).

Gambar 4-16. Peta Sebaran Lapangan Usaha Individu (Usia 18-60 Tahun) menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, 2011



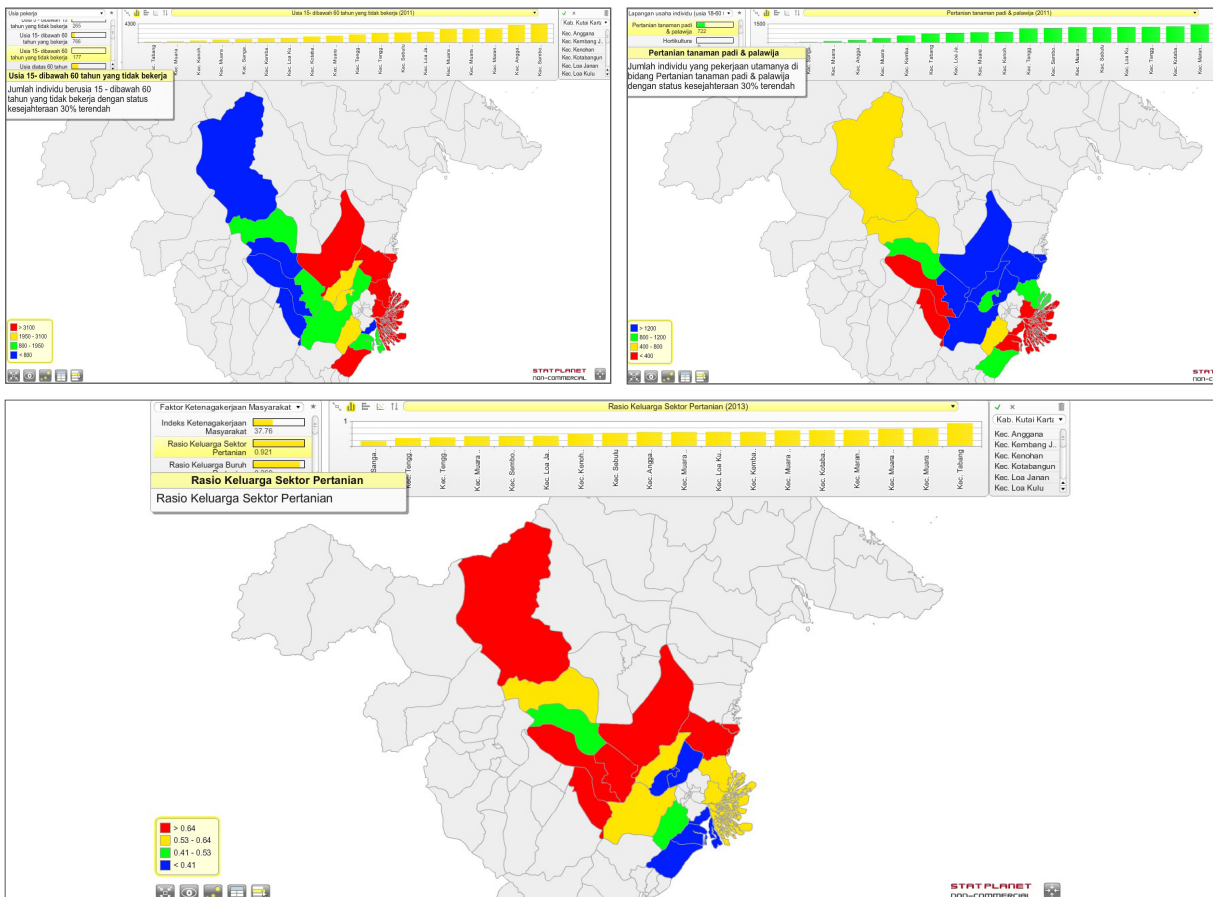
Dalam kelompok penduduk yang sama, jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja cukup besar (14.542 jiwa) (terbesar di Kalimantan Timur) sehingga penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha terutama bagi penduduk miskin dan rentan merupakan salah satu fokus penanggulangan kemiskinan, terutama dengan mempertimbangkan konteks beralihnya dominasi sektor formal menggantikan sektor informal, ketika masih banyak kelompok penduduk miskin dan rentan yang menggeluti sektor informal khususnya pertanian padi dan palawija (Gambar 4-16).

Gambar 4-17. Peta Sebaran Penduduk Usia 15 – di bawah 60 Tahun yang Tidak Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, 2011



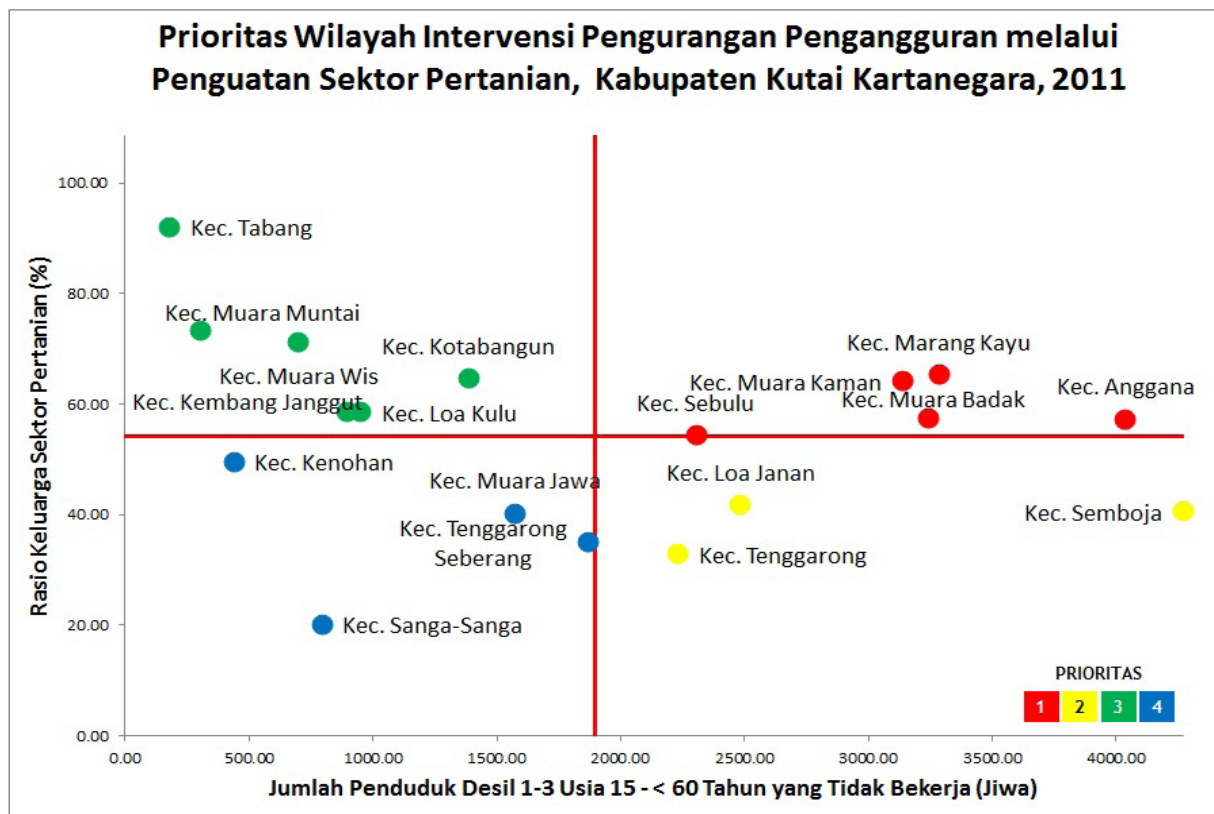
Wilayah yang relatif tinggi dalam indikator jumlah penduduk usia 15-60 tahun yang tidak bekerja antara lain meliputi Kecamatan Semboja, Anggana, Muara Kaman, Muara Badak, dan Marang Kayu. Sementara wilayah dengan rasio keluarga yang terutama bergantung kepada sektor pertanian tanaman padi dan palawija adalah Kecamatan Marang Kayu, Kotabangun, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Muara Kaman (Gambar 4-18).

Gambar 4-18. Distribusi antar-kecamatan determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara



Secara lebih spesifik, prioritas wilayah dapat diidentifikasi dengan mengamati posisi wilayah dalam empat kuadran yang dibentuk oleh indikator utama Jumlah Individu miskin dan rentan Usia 15 – di Bawah 60 Tahun yang tidak bekerja (sebagai proksi tingkat pengangguran) dengan indikator pendukung Rasio Keluarga Pertanian (sebagai proksi intervensi peningkatan serapan kerja sektor pertanian).

Gambar 4-19. Grafik Analisis Prioritas Wilayah Intervensi untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran melalui Intervensi Pada Sektor Pertanian



Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kecamatan Marang Kayu, Anggana, Muara Kaman, Muara Badak, dan Sebulu merupakan wilayah yang dapat dipilih sebagai prioritas lokus intervensi penguatan sektor informal pertanian untuk mengurangi pengangguran di lingkungan masyarakat miskin dan rentan (Gambar 4-19).



Penutup

Buku Panduan yang dilengkapi aplikasi ini merupakan alat bantu untuk mempermudah analisis situasi kemiskinan sehingga perencana bisa lebih tepat dalam mengidentifikasi prioritas masalah dan determinannya, prioritas penanganan masalahnya, wilayah prioritas untuk intervensi tersebut, dan penerima manfaat program kebijakan.

TKPK dapat menindaklanjuti substansi kebijakan hasil analisis tersebut dengan melembagakannya kedalam suatu dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD), sehingga menjadi acuan formal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD).

Data dan kerangka analisis dalam paket panduan ini juga dapat digunakan untuk menyiapkan bahan bagi forum reguler Rapat Koordinasi TKPK agar kepala daerah dapat menekankan agenda-agenda prioritas penanggulangan kemiskinan kepada seluruh dinas/instansi terkait di daerah. Di samping itu, TKPK dapat memanfaatkan paket aplikasi di dalam panduan ini untuk menganalisis data dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) setiap tahun.



Lampiran A: Teknis Penggunaan Aplikasi Berbasis Stat-Planet

Aplikasi Analisis Data ini merupakan salah satu alat interaktif yang memungkinkan penyajian data dalam peta interaktif menggunakan indikator-indikator dari Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial (BDT), Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Potensi Desa (PODES). Aplikasi ini dibangun dengan program Statplanet (www.statsilk.com) dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, misalnya pembesaran/pengecilan dan penggeseran peta, pencetakan data tabular maupun spasial serta fasilitas pembuatan grafik maupun *Scatter Plot*. Petunjuk penggunaan ini berisi spesifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, gambaran umum dan fungsi-fungsi yang tersedia dalam Aplikasi Analisis Data.

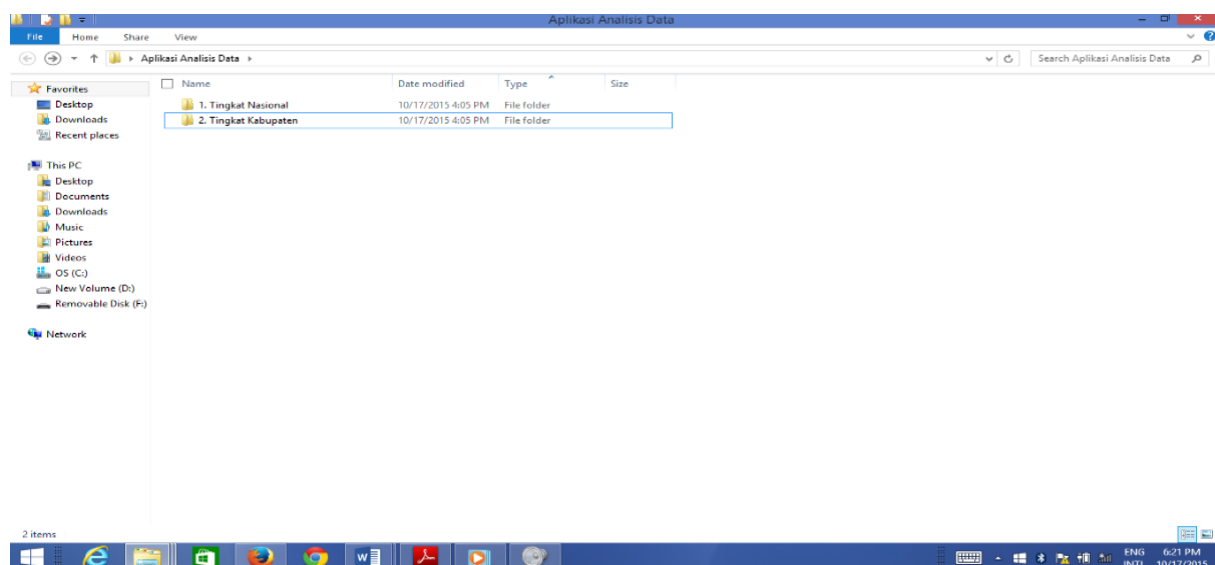
Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Aplikasi Analisis Data ini tidak memerlukan proses instalasi dan dijalankan melalui software *Adobe Flash Player* (<http://www.adobe.com/products/flashplayer/tech-specs.html>). Spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk menjalankan Aplikasi ini adalah sebagai berikut:

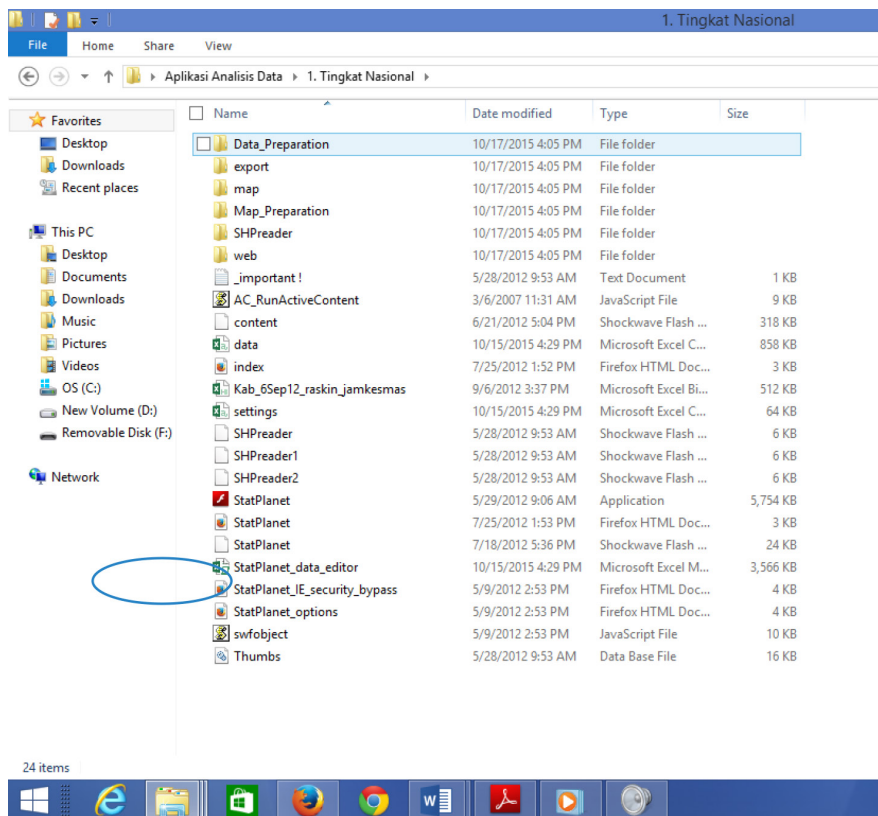
Windows®	Macintosh	Linux®
Intel® Pentium® II 450MHz, AMD Ath Ion™ 600MHz atau yang lebih cepat (yang sebanding)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PowerPC® G3 500MHz atau yang lebih cepat. ▪ Intel Core™ Duo 1.33 GHz atau yang lebih cepat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modern processor ▪ (800MHz atau yang lebih cepat)
RAM 128MB	RAM 128MB	RAM 512MB, memory grafis 128MB
VRAM 128MB		

Langkah-langkah Mengoperasikan Aplikasi

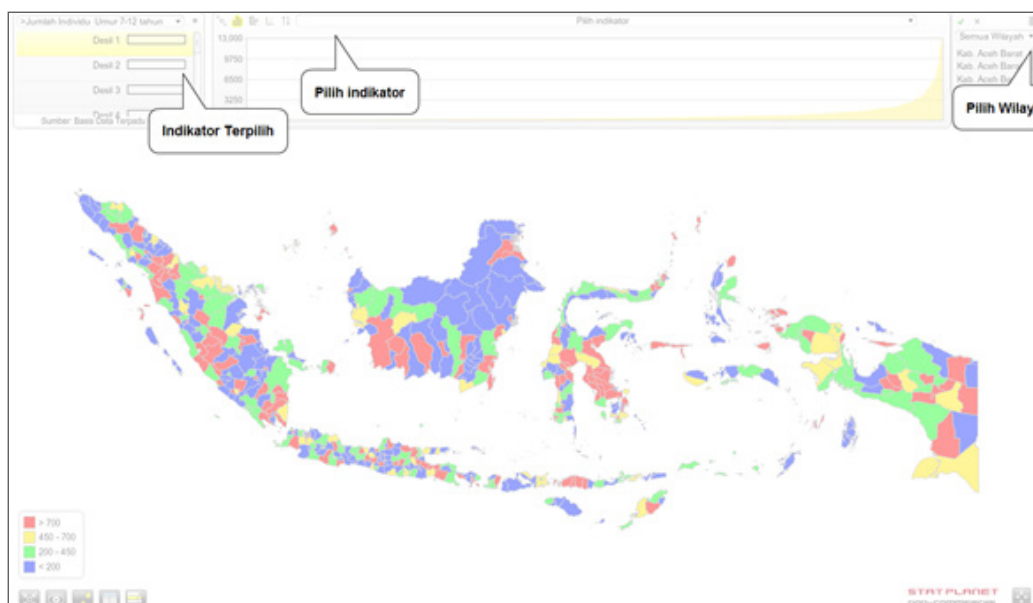
1. Dalam *flash-disc* Rakertek 2015, terdapat folder bernama 'Aplikasi Analisis Data'. *Copy and paste* folder Aplikasi Analisis Data tersebut ke komputer/laptop yang akan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi ini. Pada layar komputer akan muncul tampilan berikut:

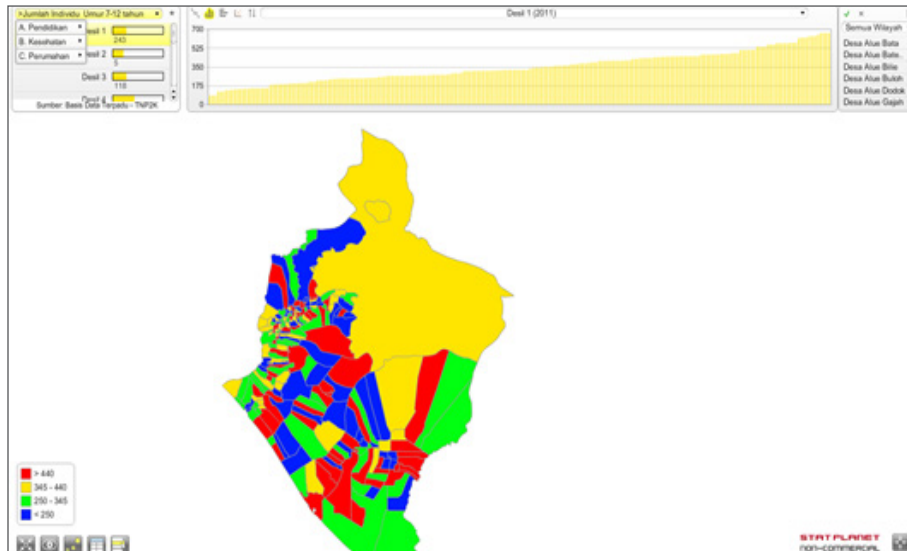


2. Klik pada folder yang sesuai dengan tingkatan analisis data yang akan dilakukan. Untuk melakukan analisis data tingkat nasional hingga kabupaten, pilih folder '1. Tingkat Nasional'. Untuk melakukan analisis data tingkat kabupaten hingga desa, pilih folder '2. Tingkat Kabupaten'.
3. Dalam setiap folder terdapat sejumlah file. Untuk membuka tampilan peta, klik file "statplanet" (lihat bagian yang dilingkari warna merah pada gambar di bawah ini).



Sebagai contoh, pilih folder '1. Tingkat Nasional', lalu klik fail 'statplanet' seperti penjelasan di atas. Pada layar komputer akan muncul tampilan sebagai berikut:





Berikut penjelasan beberapa bagian inti dari tampilan peta tersebut:

a. Daftar Kategori dan Indikator

Terdapat pada sisi kiri atas dari tampilan peta. Untuk memilih kategori dan indikator-indikator yang tersedia, klik tanda sehingga muncul daftar kategori/indikator, lalu klik pada pilihan kategori/indikator yang diinginkan. Daftar kategori, sub-kategori, indikator dan sumber data yang digunakan dalam Aplikasi Analisis Data ini dapat dilihat pada Tabel 1.

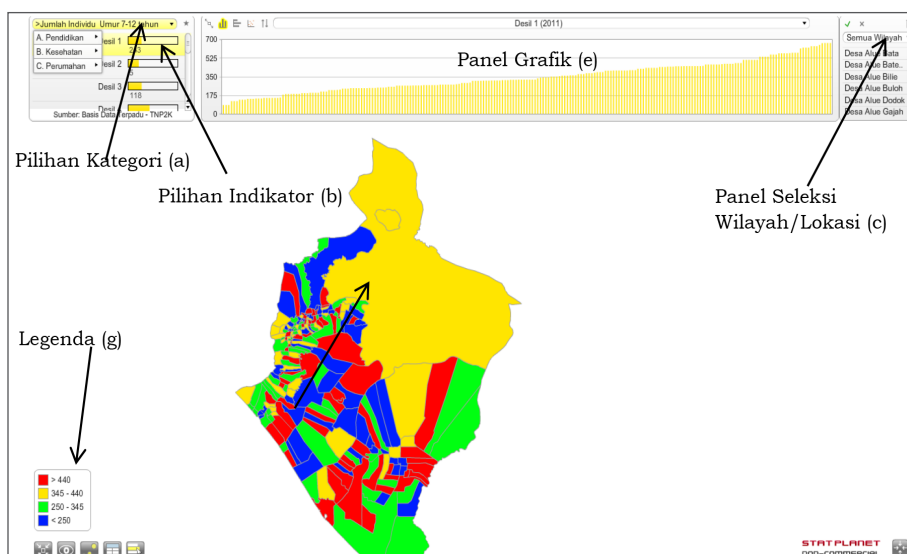
b. Daftar Wilayah

Terdapat pada sisi kanan atas dari tampilan peta. Untuk memilih wilayah, klik tanda sehingga muncul daftar wilayah, lalu klik pada nama wilayah yang diinginkan.

c. Legenda




Pada bagian kiri bawah dari tampilan peta terdapat legenda dengan penjelasan definisi masing-masing warna yang ditunjukkan pada peta.

Sebagai contoh, kita gunakan Aplikasi Tingkat Kabupaten-Desa dari Kabupaten Nagan Raya. Kita pilih katagori Pendidikan dan Indikator Desil 1 gambaran peta seperti dibawah ini:

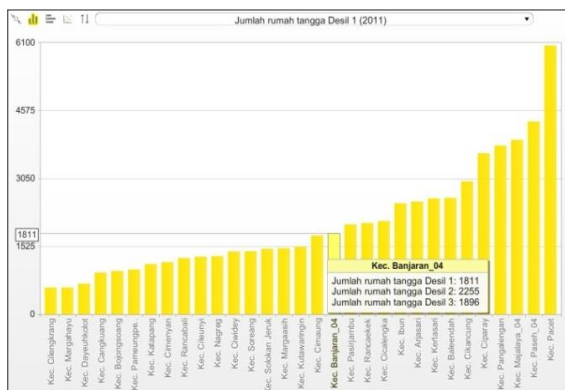


Cara Menggunakan Fungsi Panel Grafik

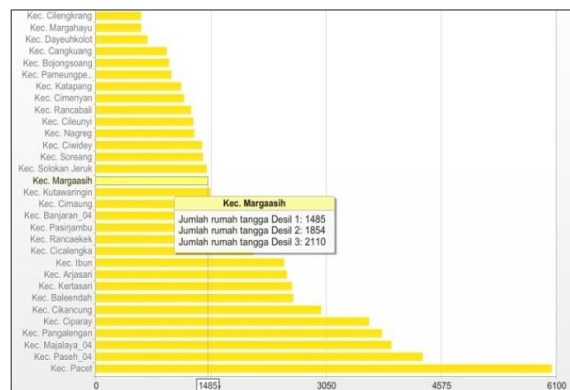
Tampilan grafik terdapat pada bagian tengah atas dari tampilan peta, yaitu di antara **Daftar Kategori dan Indikator** dan **Daftar Wilayah**. Aplikasi ini menyediakan 3 pilihan grafik, yaitu Grafik Kolom, Grafik Batang dan *Scatter Plot* (titik sebaran).


Klik tombol "Grafik Kolom"  " atau "Grafik Batang"  " untuk mengatur tampilan diagram batang menjadi horizontal ataupun vertikal. Gunakan tombol "sortir grafik batang"  " untuk mengurutkan grafik dengan pilihan nilai terkecil ke terbesar, terbesar ke terkecil, terbesar ke terkecil yang dimulai dari tengah dan alfabetis.

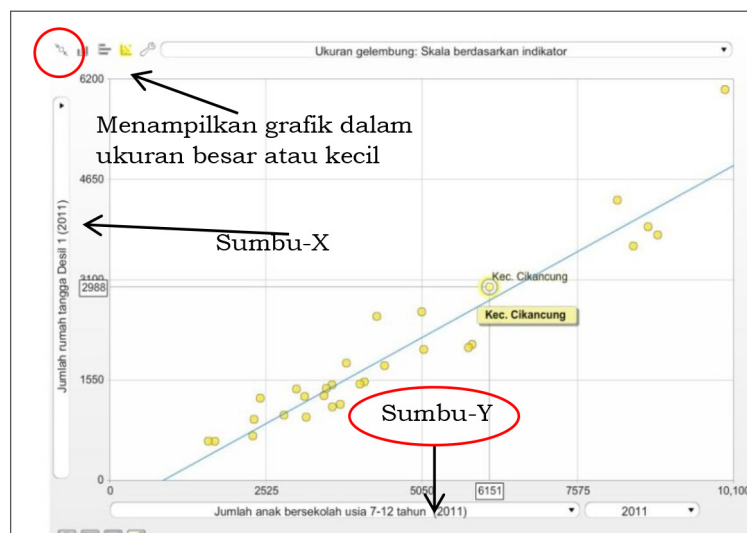
Contoh tampilan Grafik Kolom





Contoh tampilan Grafik Batang






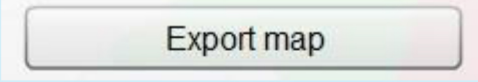
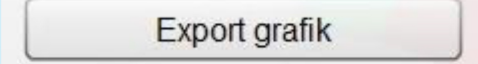





Klik tombol "Scatter Plot"  " untuk mengatur grafik dalam bentuk titik sebaran di mana apabila meng-klik tombol ini akan otomatis tersedia pilihan indikator yang akan ditampilkan pada sumbu-X dan sumbu-Y. Contoh di bawah ini menggunakan indikator "Jumlah rumah tangga Desil 1" sebagai sumbu-X dan indikator "Jumlah anak bersekolah usia 7-12 tahun" pada sumbu-Y.



Tombol  berfungsi untuk menampilkan grafik dalam ukuran besar (layar penuh), sedangkan tombol  untuk menampilkan grafik dalam ukuran lebih kecil.

Fasilitas-fasilitas Lain yang Tersedia

SIMBOL	FUNGSI
	Mengubah mode tampilan ke layar penuh (<i>fullscreen view</i>)
	Menentukan bagian-bagian peta dan grafik yang perlu ditampilkan atau disembunyikan.
	Memperbesar/memperkecil peta. Jalankan kursor <i>mouse</i> ke arah kanan-bawah layar, maka tombol navigasi ini akan muncul. Untuk menggeser posisi peta dapat dilakukan dengan meng-klik peta lalu geser tanpa mengangkat <i>mouse</i> , dan melepaskan tombol kiri mouse setelah peta mencapai posisi lokasi yang di inginkan.
	Memiliki 3 fungsi, yaitu: <i>Export data</i> , <i>Export map</i> (peta) dan <i>Export graphic</i> , sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menyimpan data ke dalam format CSV, format ini dapat dibuka oleh program <i>spreadsheet</i> (seperti MS Excel), klik simbol  2. Untuk menyimpan peta yang ditampilkan dalam format PNG. PNG merupakan salah satu jenis format file untuk menyimpan data gambar bitmap, klik simbol  3. Untuk menyimpan grafik yang ditampilkan dalam format PNG, klik simbol 
	Berfungsi untuk menggambarkan ukuran simbol (berupa lingkaran) sesuai dengan indikator yang dipetakan. Setiap simbol mewakili wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kecamatan).
	Menampilkan data atribut/tabel dari indikator yang dipetakan
	Menampilkan daftar nama kabupaten/kecamatan yang terletak di kanan-atas layar.

Penjelasan dan Bimbingan Teknis Lebih Lanjut

Untuk penjelasan dan bimbingan teknis lebih lanjut dalam hal penggunaan Aplikasi Analisis Data ini, silahkan berkonsultasi dengan Unit Penetapan Sasaran dan Pengelola Basis Data Terpadu (Unit BDT) di Sekretariat TNP2K melalui telepon 021-3912812, surel: dataterpadu@tnp2k.go.id, atau di alamat Grand Kebon Sirih, Jl. Kebon Sirih Raya No 35, Jakarta Pusat 10110.

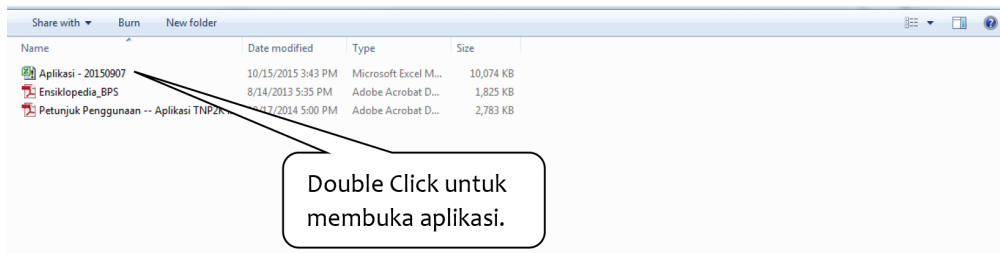


Lampiran B: Teknis Penggunaan Aplikasi Berbasis Excel

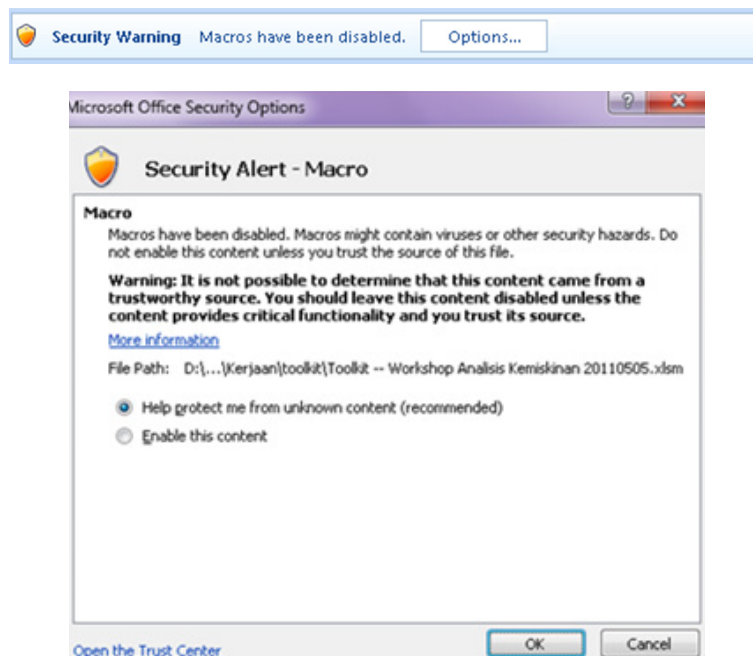
Menggunakan Aplikasi

Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, Anda harus mendaftar terlebih dahulu melalui form Login.

1. *Double click icon* file **Aplikasi – Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 2015XXXX**



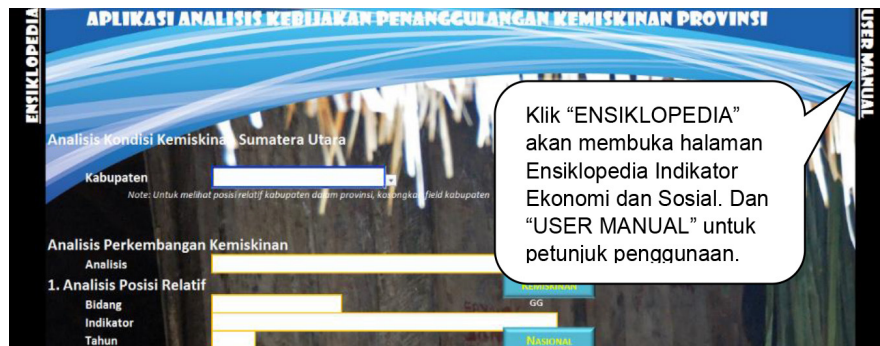
2. Apabila pada saat Anda pertama kali menjalankan Aplikasi, Anda menemukan pesan peringatan sebagai berikut, tekan tombol **Options** pada bagian kiri atas aplikasi Excel untuk kemudian muncul *Windows Security Alert*. Kemudian pilih "Enable this content" lalu klik OK.



3. Akan tampil *Form Login* seperti gambar berikut.



4. Ketik nama Anda pada kolom **nama**, sebagaimana terlihat pada gambar di atas kemudian masukkan alamat email Anda dikolom berikutnya dan pilih provinsi yang akan Anda analisis.
5. Tekan Tombol Login.
6. Setelah Anda login, maka halaman utama akan tampil seperti pada gambar berikut:



- Pastikan provinsi yang Anda masukkan sama dengan nama yang tampil pada *text box* provinsi, dan nama provinsi tersebut menyesuaikan secara otomatis pada saat Anda login ke dalam Aplikasi.
- Pilih Kabupaten/Kota yang akan dianalisis. Untuk menganalisis Provinsi kolom Kabupaten harus dikosongkan.



- Selanjutnya Anda dapat melakukan analisis, visualisasi data maupun input data sesuai dengan kebutuhan.

Menu Analisis

Analisis Posisi Relatif

Cara menggunakan:

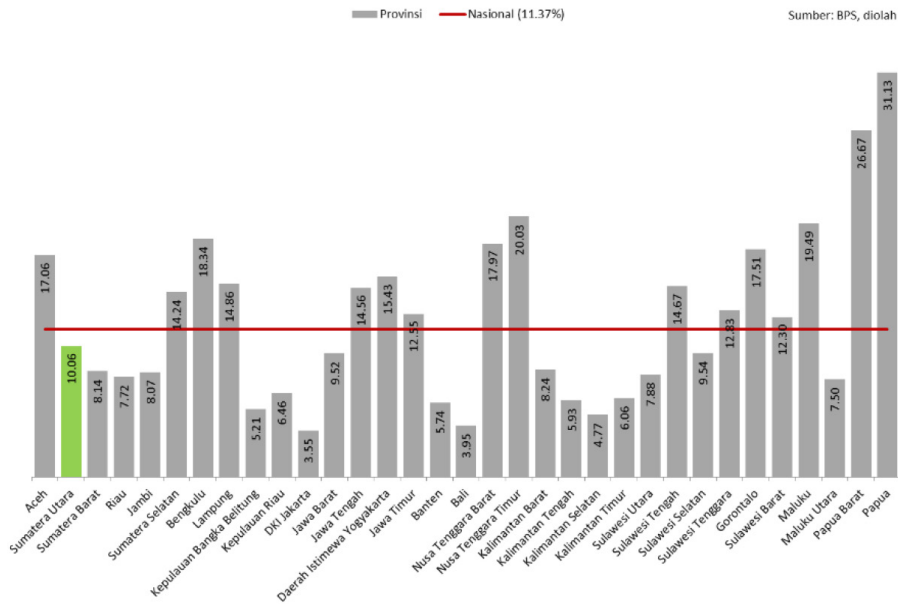
1. Manfaatkan Menu 1 “Analisis Posisi Relatif” pada aplikasi.
2. Pilih Bidang Kemiskinan Ekonomi, Indikator Tingkat Kemiskinan (%) dan Tahun analisis sesuai kebutuhan.
3. Tekan Tombol Nasional untuk menampilkan grafik provinsi, Tombol Provinsi untuk grafik kabupaten, dan Tombol Kabupaten untuk grafik Kecamatan.

1. Analisis Posisi Relatif

Bidang: Kemiskinan Ekonomi
 Indikator: Tingkat Kemiskinan (%)
 Tahun: 2013

KEMISKINAN AA
 NASIONAL
 PROVINSI
 KABUPATEN

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Nasional 2013



Analisis Perkembangan Antar Waktu

Cara menggunakan:

1. Manfaatkan Menu 2 “Analisis Perkembangan Antar Waktu” pada aplikasi
2. Pilih Bidang Kemiskinanana Ekonomi dan Indikator Tingkat Kemiskinan (%)
3. Tekan Tombol Antar Waktu untuk menampilkan grafik.

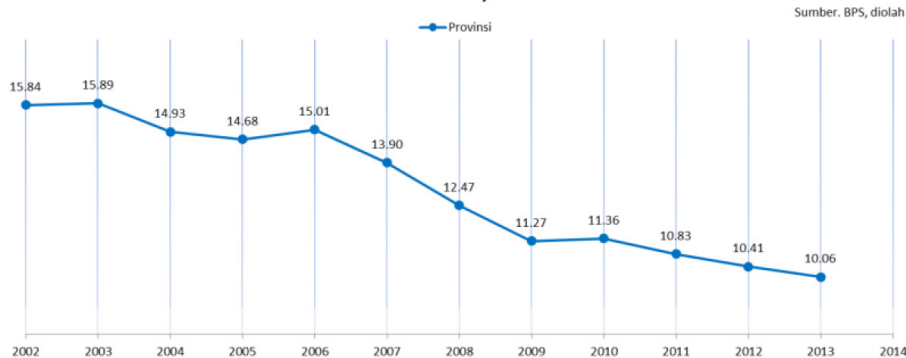
2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Bidang: Kemiskinan Ekonomi
 Indikator: Tingkat Kemiskinan (%)

3. Analisis Efektifitas

ANTAR WAKTU

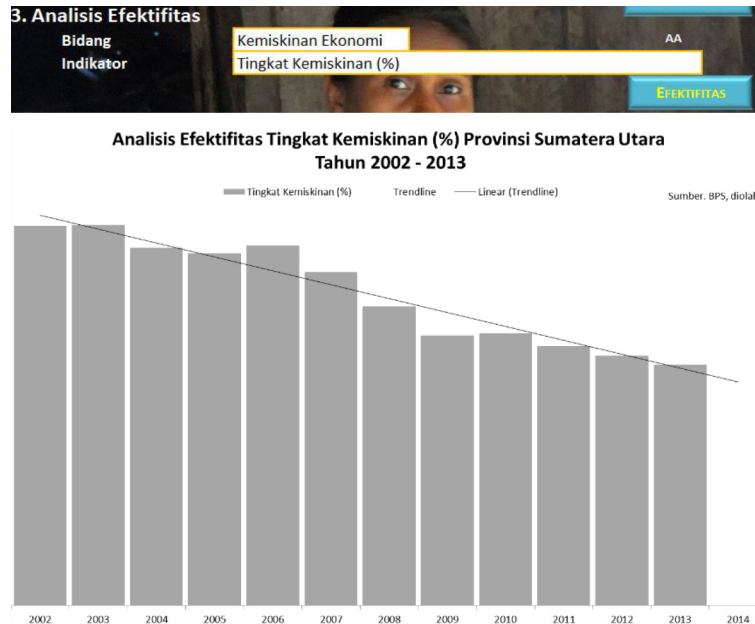
Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2002 - 2013



Analisis Efektivitas

Cara menggunakan:

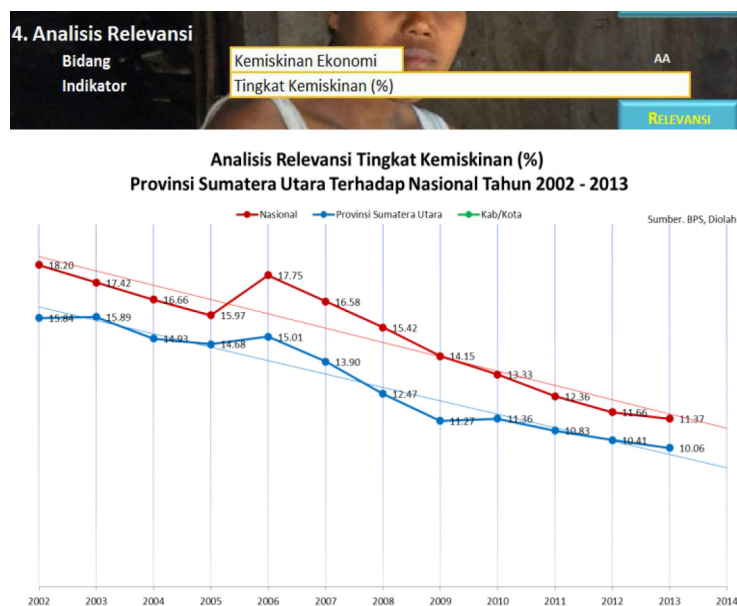
1. Manfaatkan Menu 3 “Analisis Efektivitas” pada aplikasi
2. Pilih Bidang Kemiskinan Ekonomi dan Indikator Tingkat Kemiskinan (%)
3. Tekan Tombol Efektivitas



Analisis Relevansi

Cara menggunakan:

1. Manfaatkan Menu 4 “Analisis Relevansi” pada aplikasi
2. Pilih Bidang Kemiskinan Ekonomi dan Indikator Kemiskinan (%)
3. Tekan Tombol Relevansi



Analisis Keterkaitan

Cara menggunakan:

1. Manfaatkan Menu 5 “Analisis Keterkaitan” pada aplikasi
2. Pilih Bidang yang akan dianalisis (contoh: Pendidikan) Pilih Indikator Utama, yaitu indikator yang menjadi prioritas pada Bidang yang dianalisis.
3. Pilih tiga Indikator Pendukung, yaitu indikator yang berpengaruh besar terhadap capaian Indikator Utama yang menjadi prioritas pada bidang tersebut.
4. Klik Tombol Prioritas Bidang.



Analisis Prioritas Intervensi Wilayah

Cara menggunakan:

1. Manfaatkan Menu 6 “Analisis Prioritas Intervensi Wilayah” pada aplikasi
2. Pilih Bidang yang akan dianalisis (contoh: Pendidikan)
3. Pilih Indikator Utara, yaitu yang menjadi prioritas pada Bidang yang dianalisis
4. Pilih Indikator Pendukung yaitu determinan masalah hasil dari Analisis Keterkaitan sebelumnya
5. Pilih tahun analisis dan tekan tombol Prioritas Wilayah

6. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah

Bidang: Pendidikan

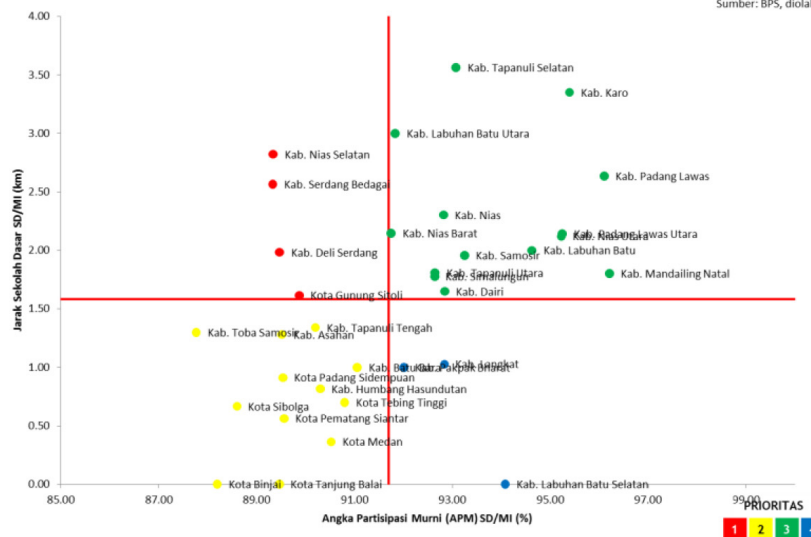
Indikator Utama: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)

Terhadap Indikator Pendukung: Jarak Sekolah Dasar SD/MI (km)

Tahun: 2011

PRIORITAS WILAYAH

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Terhadap Jarak Sekolah Dasar SD/MI (km) Sumatera Utara 2011



Entry dan Update Data

Untuk dapat menampilkan grafik-grafik analisa, diperlukan kelengkapan data baik berdasarkan kurun waktu maupun berdasarkan wilayah. Dalam proses memasukkan/mengedit data, ada dua cara/pilihan:

Data Level Kabupaten

Data sampai dengan level kabupaten kita cukup/langsung klik tombol **INPUT DATA**, tanpa harus terlebih dulu memilih nama **Kabupaten**.

APLIKASI ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN

ENSIKLOPEDIA USER MANUAL

Analisis Kondisi Kemiskinan Sumatera Utara

Kabupaten: Kab. Tapanuli Utara

Note: Untuk melihat posisi relatif kabupaten dalam provinsi, kosongkan field kabupaten

Analisis Perkembangan Kemiskinan

1. Analisis Posisi Relatif

Bidang: KEMISKINAN

Indikator: GG

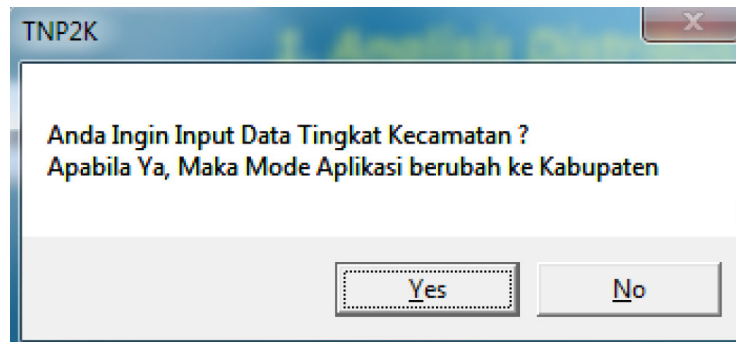
Tahun: NASIONAL

Tekan tombol INPUT DATA

Pada level data kabupaten ini, dapat dilakukan penginputan data-data untuk kabupaten lain.

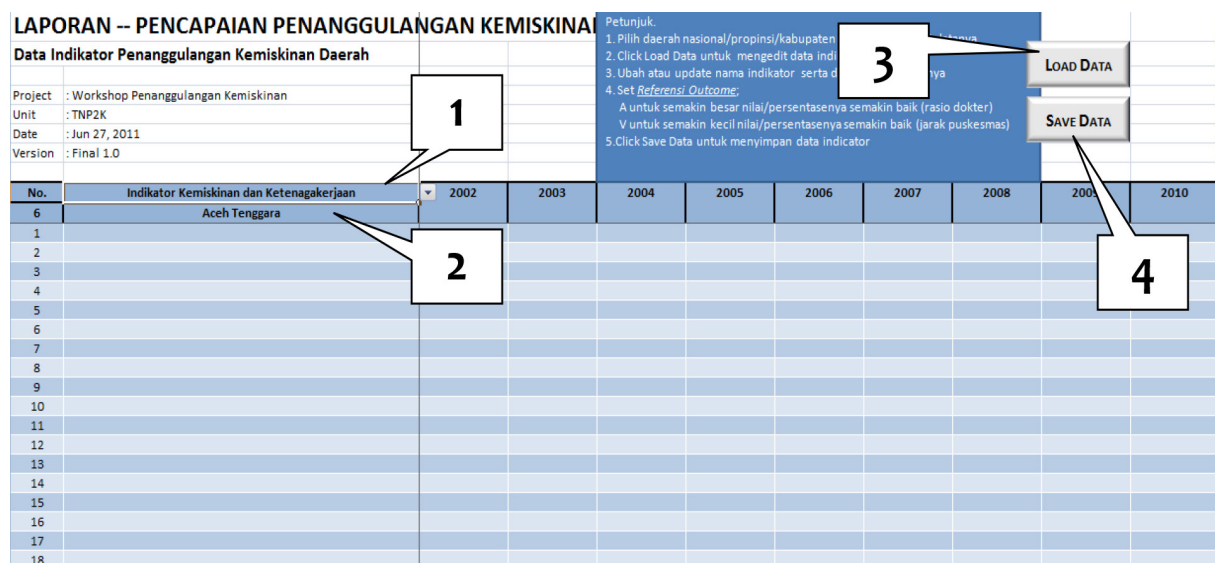
Data Level Kecamatan

Data level kecamatan dapat diinput apabila kolom Kabupaten sudah dipilih, maka akan muncul peringatan:



- Apabila memilih **Yes**, maka dalam proses input data dapat memilih/menginput data sampai level kecamatan, pada level data kecamatan ini, tidak dapat dilakukan penginputan data untuk kabupaten lain.
- Namun bila memilih **No** proses input hanya sampai level kabupaten (seperti langkah 1. Level Data Kabupaten)

Setelah klik pada tombol **Input Data**, maka akan muncul sheet data menu sebagai berikut :



No.	Indikator Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
6	Aceh Tenggara									
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

Untuk dapat melakukan *entry/update* data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Klik / Pilih nama Indikator yang datanya akan diinput
2. Pilih Lokasi / Wilayah yang akan diisikan/update datanya
Pada kolom lokasi yang dipilih akan muncul daftar kabupaten, dan kecamatan apabila akan input kecamatan.
3. Klik *Load Data* untuk menampilkan data sesuai dengan indikator pendukung, maka akan muncul data sebagai berikut:

No.	Indikator Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
2	Nanggroe Aceh Darussalam									
1	Indikator Kemiskinan dan Ketenagakerjaan									
2	Indikator Utama									
3	Tingkat Kemiskinan (%)							23.53	21.80	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.20						9.56	8.71	8.60
5	Indikator Pendukung									
6	Tingkat Kemiskinan - Kota (%)							16.67	15.44	14.70
7	Tingkat Kemiskinan - Desa (%)							26.30	24.37	23.50
8	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)							959700.00	892900.00	861900.00
9	Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa)							195800.00	182200.00	173400.00
10	Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa)							763900.00	710700.00	688500.00
11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)							4.92	4.46	
12	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks)							3.55	3.45	
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks)							5.47	4.87	
14	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)							1.50	1.34	
15	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)							1.07	1.04	
16	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)							1.67	1.46	
17										
18										

Apabila sudah dilakukan perubahan/edit data, dapat dilakukan menyimpan perubahan dengan mengklik tombol **save data**, maka perubahan data sudah tersimpan.

Data Indikator

Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ini dapat dikembangkan/disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, terutama indikator-indikator yang tidak terdapat dalam 'standar' indikator yang telah dicantumkan.

Penambahan indikator ini dapat dilakukan pada proses input data :

1. Pilih Jenis/Kelompok Indikator Daerah
2. Pilih Daerah Kab/Kecamatan yang akan diisikan datanya
3. Pilih/klik tombol **Load Data**
4. Pada kolom no. 3 (**indikator daerah 1**), ubah/ganti dengan nama indikator yang akan dimasukkan, misal **Persentase Penduduk Desil 1-3**.
5. Perhatikan Input Reff Outcome untuk mengenali Indikator yang akan kita tambahkan: Isi "V" untuk Indikator yang semakin rendah jumlahnya semakin baik, dan "A" untuk Indikator yang semakin tinggi jumlahnya semakin baik.
6. Penggantian indikator ini otomatis akan tersimpan dan akan digunakan untuk data selanjutnya.
7. Setelah selesai ubah/edit, indikator daerah dan atau data inputan siap di simpan (**Save Data**).

LAPORAN -- PENCAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN		Petunjuk.									
Data Indikator Penanggulangan Kemiskinan Daerah		1. Pilih daerah nasional/propinsi/kabupaten 2. Click Load Data untuk mengedit data ini 3. Ubah atau update nama indikator serta Reff Outcome-nya 4. Set Referensi Outcome: A untuk semakin besar nilai/persentasenya semakin baik (rasio dokter) V untuk semakin kecil nilai/persentasenya semakin baik (jarak puskesmas) 5. Click Save Data untuk menyimpan data indikator									
Project	: Workshop Penanggulangan Kemiskinan										
Unit	: TNP2K										
Date	: Jun 27, 2011										
Version	: Final 1.0										
No.	Indikator Daerah	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
5	Kec. Pajo										
1	Indikator Daerah										
2	Indikator Utama										
3	Sebaran Luas Lahan Sawah (%)										
4	Indikator 02										
5	Indikator 03										
6	Indikator 04										
7	Indikator 05										
8	Indikator 06										
9	Indikator 07										
10	Indikator 08										
11	Indikator 09										
12	Indikator 10										
13	Indikator 11										
14	Indikator 12										
15	Indikator 13										
16	Indikator 14										
17	Indikator 15										
18	Indikator 16										

Data Pengguna

Informasi mengenai pengguna terdapat pada *sheet user management* (Sheet "UserMgt"). Untuk melepas kunci/lock pilihan kabupaten yang terdapat pada **Main Menu**, maka Anda dapat melakukannya dengan mudah, cukup dengan menghapus data pada kolom kabupaten.

	A	B	C	D	E
1	MASTER -- USER MANAGEMENT				
2	Form User Management				
3					
4	Project	: Workshop Penanggulangan Kemiskinan			
5	Unit	: TNP2K			
6	Date	: Jun 27, 2011			
7	Version	: Final 1.0			
8					
9	No.	Nama	Email	Provinsi	Kabupaten
10					
11	1	t	t	Nusa Tenggara Barat	Dompu
12	2				
13	3				
14	4				
15	5				
16	6				
17	7				
18	8				
19	9				
20	10				
21					



Lampiran C: Variabel Data Susenas, Podes dan BDT

Variabel BDT

BIDANG	KATEGORI	VARIABEL
PENDIDIKAN	Jumlah Individu Usia Sekolah Berdasarkan Usia dan Desil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak yang bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah anak yang bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Individu Usia Tidak Sekolah Berdasarkan Usia dan Desil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 13-15 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 20% terendah

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 16-18 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Individu Usia Tidak Sekolah Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak laki-laki yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun • Jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun • Jumlah anak laki-laki yang tidak bersekolah usia 13-15 tahun • Jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah usia 13-15 tahun • Jumlah anak laki-laki yang tidak bersekolah usia 16-18 tahun • Jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah usia 16-18 tahun
	Jumlah Individu menurut Ijazah Tertinggi dan Desil Tidak Punya Ijazah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah individu Menurut Tidak Punya Ijazah dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah individu Menurut Tidak Punya Ijazah dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah individu Menurut Tidak Punya Ijazah dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah individu Menurut Tidak Punya Ijazah dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu menurut Ijazah Tertinggi dan Desil SD/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SD/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SD/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SD/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SD/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu menurut Ijazah Tertinggi dan Desil SMP/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SMP/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SMP/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SMP/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah individu Menurut Ijazah Tertinggi SMP/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah



	Jumlah Individu menurut Ijiah Tertinggi dan Desil SMA/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi SMA/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi SMA/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi SMA/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi SMA/Sederajat dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu menurut Ijiah Tertinggi dan Desil Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi Perguruan Tinggi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi Perguruan Tinggi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi Perguruan Tinggi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah individu Menurut Ijiah Tertinggi Perguruan Tinggi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
KESEHATAN	Jumlah Individu dengan Kecacatan menurut Desil dan Jenis Kelamin Desil 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu laki-laki dengan kecacatan dan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah Individu perempuan dengan kecacatan dan status kesejahteraan 10% terendah
	Jumlah Individu dengan Kecacatan menurut Desil dan Jenis Kelamin Desil 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu laki-laki dengan kecacatan dan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah Individu perempuan dengan kecacatan dan status kesejahteraan 20% terendah
	Jumlah Individu dengan Kecacatan menurut Desil dan Jenis Kelamin Desil 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu laki-laki dengan kecacatan dan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah Individu perempuan dengan kecacatan dan status kesejahteraan 30% terendah
	Jumlah Individu dengan Kecacatan menurut Desil dan Jenis Kelamin Desil 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu laki-laki dengan kecacatan dan status kesejahteraan 40% terendah • Jumlah Individu perempuan dengan kecacatan dan status kesejahteraan 40% terendah
PERUMAHAN	Jumlah Rumah Tangga menurut Status kepemilikan tempat tinggal dan Desil Milik Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal milik sendiri dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal milik sendiri dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal milik sendiri dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal milik sendiri dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga menurut Status kepemilikan tempat tinggal dan Desil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal kontrak atau sewa status kesejahteraan 10% terendah

	Kontrak/Sewa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal kontrak atau sewa status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal kontrak atau sewa status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal kontrak atau sewa status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga menurut Status kepemilikan tempat tinggal dan Desil Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal bukan milik sendiri atau kontrak/sewa dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal bukan milik sendiri atau kontrak/sewa dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal bukan milik sendiri atau kontrak/sewa dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal bukan milik sendiri atau kontrak/sewa dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB Milik Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik sendiri dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik sendiri dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik sendiri dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik sendiri dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB Milik Bersama/Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik bersama/umum dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik bersama/umum dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik bersama/umum dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB milik bersama/umum dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan status kepemilikan fasilitas BAB Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan tidak ada kepemilikan fasilitas BAB dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tidak ada kepemilikan fasilitas BAB dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan tidak ada kepemilikan fasilitas BAB dengan status kesejahteraan 30% terendah



		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan tidak ada kepemilikan fasilitas BAB dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber air minum utama: Air Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air kemasan dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air kemasan dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air kemasan dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air kemasan dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber air minum utama: Air Ledeng	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air ledeng dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air ledeng dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air ledeng dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari air ledeng dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber air minum utama: Sumber Terlindungi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur dilindungi oleh tembok dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur dilindungi oleh tembok dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur dilindungi oleh tembok dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur dilindungi oleh tembok dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber air minum utama: Sumber Tidak Terlindungi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tidak dilindungi oleh tembok, mata air dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tidak dilindungi oleh tembok, mata air dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tidak dilindungi oleh tembok, mata air dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum utama dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tidak dilindungi oleh tembok, mata air dengan status kesejahteraan 10% terendah

		sumur tidak dilindungi oleh tembok, mata air dengan status kesejahteraan 10% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber penerangan utama: Listrik Non PLN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh PLN dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh PLN dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh PLN dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh PLN dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber penerangan utama: Listrik PLN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh pihak lain selain PLN dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh pihak lain selain PLN dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh pihak lain selain PLN dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik yang dikelola oleh pihak lain selain PLN dengan status kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber penerangan utama: Tidak Ada Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya dengan status kesejahteraan 10% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya dengan status kesejahteraan 20% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya dengan status kesejahteraan 30% terendah • Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya dengan status kesejahteraan 40% terendah
KETENAGAKERJAAN	Jumlah IDV Bekerja & Desil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah



		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah IDV Tidak Bekerja dan Desil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Partisipasi Kerja: Bekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Partisipasi Kerja: Tidak Bekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu umur 16-59 Yang Tidak Bekerja menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertanian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertanian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertanian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertanian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Holtikultura dan

	Lapangan Pekerjaan: Hortikultura	<p>Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Hortikultura dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Hortikultura dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Hortikultura dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perkebunan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perkebunan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perkebunan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perkebunan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan Tangkap dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan Tangkap dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan Tangkap dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan Tangkap dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan Budidaya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan Budidaya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan



		<p>Budidaya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perikanan Budidaya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Peternakan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Peternakan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Peternakan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Peternakan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Kehutanan & Pertanian Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Kehutanan & Pertanian Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Kehutanan & Pertanian Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Kehutanan & Pertanian Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Kehutanan & Pertanian Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Pertambangan/Penggalian	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertambangan/Penggalian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertambangan/Penggalian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertambangan/Penggalian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Pertambangan/Penggalian dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Industri

	Lapangan Pekerjaan: Industri Pengolahan	<p>Pengolahan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Industri Pengolahan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Industri Pengolahan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Industri Pengolahan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Listrik dan Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Listrik dan Gas dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Listrik dan Gas dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Listrik dan Gas dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Listrik dan Gas dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Bangunan dan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Bangunan dan Konstruksi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Bangunan dan Konstruksi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Bangunan dan Konstruksi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Bangunan dan Konstruksi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perdagangan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perdagangan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perdagangan



		<p>dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Perdagangan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Hotel & Rumah Makan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Hotel & Rumah Makan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Hotel & Rumah Makan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Hotel & Rumah Makan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Hotel & Rumah Makan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Transportasi & Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Transportasi & Pergudangan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Transportasi & Pergudangan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Transportasi & Pergudangan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Transportasi & Pergudangan dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Informasi & Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Informasi & Komunikasi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Informasi & Komunikasi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Informasi & Komunikasi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Informasi & Komunikasi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Keuangan &

	Lapangan Pekerjaan: Keuangan & Asuransi	<p>Asuransi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Keuangan & Asuransi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Keuangan & Asuransi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Keuangan & Asuransi dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Jasa dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Jasa dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Jasa dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Jasa dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu umur 16-59 tahun menurut Lapangan Pekerjaan: Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Yang Bekerja Dengan Umur 16-59 Tahun Menurut Pekerjaan Lainnya dan Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
KESEJAHTERAAN EKONOMI	Jumlah Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah



		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah
	Jumlah RT menurut Desil dan Jenis Kelamin KRT	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Laki-laki Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 10% terendah • Jumlah Individu Perempuan Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 10% terendah • Jumlah Individu Laki-laki Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 20% terendah • Jumlah Individu Perempuan Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 20% terendah • Jumlah Individu Laki-laki Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 30% terendah • Jumlah Individu Perempuan Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 30% terendah • Jumlah Individu Laki-laki Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 40% terendah • Jumlah Individu Perempuan Menurut Jenis Kelamin KRT dan Status Kesejahteraan 40% terendah
	Jumlah Individu berumur >60 Tahun Menurut Desil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu Umur >60 tahun Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 10% terendah • Jumlah Individu Umur >60 tahun Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 20% terendah • Jumlah Individu Umur >60 tahun Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 30% terendah • Jumlah Individu Umur >60 tahun Menurut Status Kesejahteraan Sampai Dengan 40% terendah

Variabel Susenas

BIDANG	VARIABEL
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan (%) • Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) • Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) • Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)
INFRASTRUKTUR DASAR	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) • Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)
PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) • Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) • Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) • Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) • Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) • Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) • Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44 (%) • Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ (%) • Rasio APM perempuan/laki-laki (%) • Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki (%) • Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)



Variabel Podes

BIDANG	KATEGORI	VARIABEL
KESEJAHTERAAN EKONOMI	Penghasilan Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio penghasilan utama penduduk Pertanian • Rasio penghasilan utama penduduk Pertambangan • Rasio penghasilan utama penduduk Industri pengolahan • Rasio penghasilan utama penduduk Perdagangan & rumah makan • Rasio penghasilan utama penduduk Angkutan, pergudangan, komunikasi • Rasio penghasilan utama penduduk Jasa • Rasio penghasilan utama penduduk lainnya
	Industri Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri kulit • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri kayu • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri logam mulia • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri anyaman • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri gerabah/keramik • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri kain/tenun • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri makanan & minuman • Jumlah industri mikro & kecil Jumlah industri lainnya
	Jarak ke Pertokoan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio keberadaan kelompok pertokoan • Rata2 jarak ke kelompok pertokoan terdekat
	Pangkalan Agen Minyak	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio keberadaan pangkalan/agen minyak tanah • Rasio keberadaan pangkalan/agen LPG
	Potensi Pasar dan Toko	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pasar dengan bangunan permanen • Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen • Jumlah pasar tanpa bangunan • Jumlah minimarket • Jumlah toko/warung kelontong • Jumlah warung/kedai makanan • Jumlah restoran/rumah makan • Jumlah hotel • Jumlah penginapan
	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) • Jumlah Koperasi Jumlah industri Kecil dan Kerajinan (Kopinkra) • Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) • Jumlah Koperasi lainnya
	Kios Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio keberadaan kios pertanian Milik KUD • Rasio keberadaan kios pertanian Milik Non KUD
	Fasilitas Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio fasilitas kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) • Rasio fasilitas kredit Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP E) • Rasio fasilitas kredit Kredit Usaha Kecil (KUK)
	Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bank Umum Pemerintah • Jumlah Bank Umum Swasta • Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
	PENDIDIKAN	

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi • Jumlah lembaga pendidikan SLB • Jumlah lembaga pendidikan Pondok Pesantren • Jumlah lembaga pendidikan Madrasah Diniyah • Jumlah lembaga pendidikan Seminari/Sejenisnya • Rata-rata jarak terdekat TK/RA • Rata-rata jarak terdekat SD/MI • Rata-rata jarak terdekat SMP/MTs • Rata-rata jarak terdekat SMU/MA • Rata-rata jarak terdekat SMK • Rata-rata jarak terdekat Perguruan Tinggi • Rata-rata jarak terdekat SLB • Jumlah Sarana Pendidikan SD, SMP, SMA
KESEHATAN		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana kesehatan Rumah sakit • Jumlah sarana kesehatan Rumah sakit bersalin • Jumlah sarana kesehatan Puskesmas dg rawat inap • Jumlah sarana kesehatan Puskesmas tanpa rawat inap • Jumlah sarana kesehatan Puskesmas pembantu • Jumlah sarana kesehatan Poliklinik/balai pengobatan • Jumlah sarana kesehatan Tempat praktek dokter • Jumlah sarana kesehatan Tempat praktek bidan • Jumlah sarana kesehatan Poskesdes • Jumlah sarana kesehatan Polindes • Jumlah sarana kesehatan Posyandu • Jumlah sarana kesehatan Apotek • Rata rata jarak terdekat Rumah sakit • Rata rata jarak terdekat Rumah sakit bersalin • Rata rata jarak terdekat Puskesmas dg rawat inap • Rata rata jarak terdekat Puskesmas tanpa rawat inap • Rata rata jarak terdekat Puskesmas pembantu • Rata rata jarak terdekat Poliklinik/balai pengobatan • Rata rata jarak terdekat Tempat praktek dokter • Rata rata jarak terdekat Tempat praktek bidan • Rata rata jarak terdekat Poskesdes • Rata rata jarak terdekat Polindes • Rata rata jarak terdekat Apotek • Rata rata jarak terdekat Toko khusus obat/jamu • Jumlah tenaga kesehatan Dokter pria • Jumlah tenaga kesehatan Dokter wanita • Jumlah tenaga kesehatan Dokter gigi • Jumlah tenaga kesehatan Bidan • Jumlah tenaga kesehatan Lainnya • Rasio keberadaan bidan desa(BDD) • Jumlah penderita gizi buruk • Jumlah penerima kartu JAMKESMAS/JAMKESDA • Jumlah surat miskin/SKTM yg dikeluarkan desa • Jumlah warga peserta BPJS Kesehatan/JKN • Jumlah Dokter • Rasio Desa yang ada dokternya • Angka Kesakitan • Jumlah RS • Rasio Desa yang memiliki Posyandu • Rasio Desa yang memiliki Tempat Praktek Kesehatan
PERUMAHAN		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluarga pengguna listrik PLN • Jumlah keluarga pengguna listrik Non PLN



		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluarga tanpa listrik • Rasio tempat BAB Jamban sendiri • Rasio tempat BAB Jamban bersama • Rasio tempat BAB Jamban umum • Rasio tempat BAB Bukan jamban • Rasio tempat buangsampah Tempatsampah • Rasio tempat buangsampah Dalam lubang/dibakar • Rasio tempat buangsampah Sungai/saluran irigasi • Rasio tempat buangsampah Drainase • Rasio tempat buangsampah Lainnya • Rasio keberadaan tempat penampungan sampah sementara(TPS) • Rasio tempat pembuangan limbah cair Lubang resapan • Rasio tempat pembuangan limbah cair Drainase(got selokan) • Rasio tempat pembuangan limbah cair Sungai/saluran irigasi • Rasio tempat pembuangan limbah cair Dalam lubang/tanah • Rasio tempat pembuangan limbah cair Lainnya • Rasio jenis bahan bakar memasak Gas kota • Rasio jenis bahan bakar memasak LPG • Rasio jenis bahan bakar memasak Minyak tanah • Rasio jenis bahan bakar memasak Kayu bakar • Rasio jenis bahan bakar memasak Lainnya • Rasio keberadaan permukiman kumuh • Jumlah lokasi permukiman kumuh Jumlah bangunan rumah di permukiman kumuh • Jumlah keluarga di permukiman kumuh • Rasio sumber air minum Air kemasan • Rasio sumber air minum Ledeng dg meteran • Rasio sumber air minum Ledeng tanpa meteran • Rasio sumber air minum Sumur bor/pompa • Rasio sumber air minum Sumur • Rasio sumber air minum Mata air • Rasio sumber air minum Sungai/danau/kolam • Rasio sumber air minum Air hujan • Rasio sumber air minum Lainnya • Air bersih • Listrik • Sanitasi layak • keramik/semen • Aset Berharga • Desa Kumuh
--	--	---



Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812
Faksimili : (021) 3912511
E-mail : info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id